

Laporan Kinerja 2023



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 17 Januari 2024

Plt. Direktur,



Erik Teguh Primiantoro

NIP.19690114 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia	3
1.4 Sarana dan Prasarana	5
1.5 Permasalahan yang Sedang Dihadapi.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja	15
3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2.1 Capaian Kinerja	16
3.2.2 Efektivitas Capaian Kinerja	18
3.2.3 Efisiensi Capaian Kinerja.....	29
3.2.4 Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024	21
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
3.3.1 IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	23
3.3.2 IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	33
3.3.3 IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.	40
3.3.4 IKK Layanan Informasi Geospasial Tematil LHK	47
3.3.5 IKK Data dan Informasi Deforestasi	60
3.4 Realisasi Anggaran	70
3.5. Penghargaan atas Prestasi Kerja.....	75
BAB IV PENUTUP	76
4.1. Kesimpulan	76
4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit kerja Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 Tahun 2021	3
Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan	4
Tabel 3. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	4
Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023	5
Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024. 7	
Tabel 6. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024	8
Tabel 7. Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2023	10
Tabel 8. Alokasi Anggaran Tahun 2023	12
Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023	13
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023	14
Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2023	16
Tabel 12. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2023	17
Tabel 13. Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	18
Tabel 14. Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023	19
Tabel 15. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra	22
Tabel 16. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	23
Tabel 17. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	23
Tabel 18. Jumlah klaster Inventarisasi Hutan Nasional sampai dengan Tahun 2023	24
Tabel 19. Potensi Tegakan hutan berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Nasional	25
Tabel 20. Data dan Pelaksanaan Klaster 2023	26

Tabel 21. Sebaran Penutupan Lahan di Indonesia.....	32
Tabel 22. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 Kelompok Pulau/Kepulauan Besar (Ribu Ha).....	32
Tabel 23. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	33
Tabel 24. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	34
Tabel 25. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.....	40
Tabel 26. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.....	41
Tabel 27. Perubahan luas PIPPIB Tahun 2023 Periode I terhadap periode sebelumnya	44
Tabel 28. Perubahan luas PIPPIB Tahun 2023 Periode II terhadap periode sebelumnya	44
Tabel 29. Jumlah Permohonan Klarifikasi PIPPIB Tahun 2023	46
Tabel 30. Realisasi Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Gespasial Tematik LHK.....	47
Tabel 31. Progres Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Gespasial Tematik LHK	47
Tabel 32. Perkembangan Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK	48
Tabel 33. Daftar Nama Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK.....	49
Tabel 34. Penjamintan Kualitas IGT	53
Tabel 35. Rekapitulasi Pelayanan Data	56
Tabel 36. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi.....	60
Tabel 37. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi.....	61
Tabel 38. Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	64
Tabel 39. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	65
Tabel 40. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022.....	66

Tabel 41. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	67
Tabel 42. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Knversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022.....	68
Tabel 43. Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022	69
Tabel 44. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja.....	71
Tabel 45. Alokasi Anggaran 2023 setelah Revisi.....	71
Tabel 46. Realisasi Anggaran Per-Sub Direktorat	72
Tabel 47. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021	2
Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan.....	4
Gambar 3. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2023	11
Gambar 4. Alokasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Lingkup Direktorat Inventarisasi & Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023	13
Gambar 5. Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990-2022.....	29
Gambar 6. Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2022	29
Gambar 7. Mosaik Citra Landsat 8 OLI Tahun 2022.....	30
Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022	30
Gambar 9. Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia.....	31
Gambar 10. Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan	31
Gambar 11. Diagram Penutupan Lahan Berhutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan Seluruh Indonesia	32
Gambar 12. Diagram Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar	33
Gambar 13. Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan Per Provinsi	33
Gambar 14. Neraca Sumber Daya Hutan Indonesia	35
Gambar 15. Neraca Kawasan Hutan Indonesia (Juta ha).....	36
Gambar 16. Neraca Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan Hutan (Ribu ha).....	36
Gambar 17. Neraca Penutupan Hutan Indonesia (Juta ha)	37
Gambar 18. Neraca Penutupan Hutan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Ribu ha)	37
Gambar 19. Neraca Penutupan Hutan Terbesar di Lima Provinsi (Ribu ha)	37
Gambar 20. Neraca Potensi Kayu di Indonesia (Juta m ³)	38
Gambar 21. Neraca Potensi Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Juta m ³).....	38
Gambar 22. Neraca Potensi Kayu Terbesar di Lima Provinsi (Juta m ³).....	38

Gambar 23. Neraca Potensi Moneter Kayu di Indonesia.....	39
Gambar 24. Meraca Moneter Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Rp. Trilliun)	39
Gambar 25. Neraca Potensi Moneter Kayu Terbesar di Lima Provinsi (Rp. Trilliun)	39
Gambar 26. Grafik Perkembangan Luas Areal PIPPIB.....	43
Gambar 27. PIPPIB Tahun 2023 di SIGAP KLHK.....	44
Gambar 28. Album PIPPIB Tahun 2023	45
Gambar 29. Contoh Peta Hasil Telaahan Permohonan terhadap Peta PIPPIB	46
Gambar 30. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022	61
Gambar 31. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2022	62
Gambar 32. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdayalah dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional. Arah kebijakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah. Upaya untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh data dan peta sumberdaya hutan yang terkini. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berperan dalam penyediaan data dan peta sumber daya hutan terkini melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta peningkatan keterbukaan data dan peta sumber daya hutan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dan evaluasi kebijakan.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcome yang harus dicapai selama 5 tahun. Target dan indikator untuk tahun 2023 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja 2023 dan diikrarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

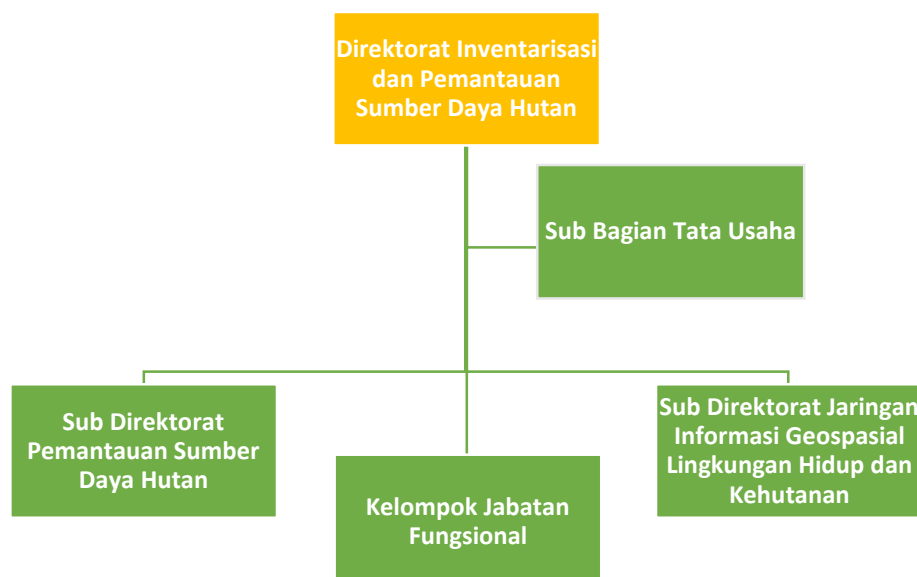
Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksana tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan didukung oleh 2 (dua) Unit Kerja Eselon III dan 1 (satu) Unit Kerja Eselon IV. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja seperti tertuang pada gambar berikut:

<i>Unit Kerja</i>	<i>Tugas Pokok dan Fungsi</i>
<i>Sub Diektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan</i>	<i>melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan, neraca dan analisis spasial sumber daya hutan</i>
<i>Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>	<i>melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan</i>
<i>Sub Bagian Tata Usaha</i>	<i>melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.</i>

Tabel 1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit kerja Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 Tahun 2021

Sejalan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, terdapat perubahan Struktur Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 1 Juli 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengalami perubahan dari semula 4 Subdirektorat menjadi 2 Subdirektorat.

1.3 Sumber Daya Manusia

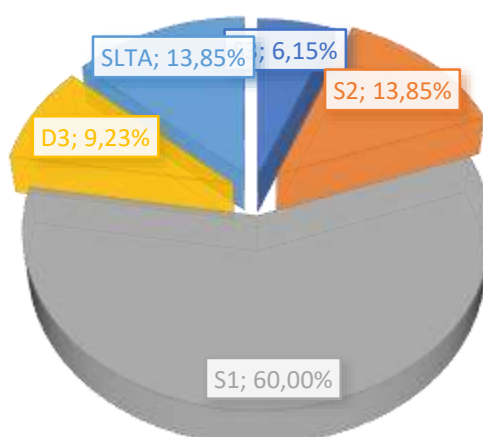
Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 67 orang, diantara jumlah tersebut terdapat 1 orang pegawai yang sedang melaksanakan karyasiswa/tugas belajar. Klasifikasi berdasarkan golongan dan pendidikan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2022 dan Tahun 2023 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Keterangan
		Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Golongan IV	12	11	
2	Golongan III	38	38	1 Orang Karyasiswa
3	Golongan II	5	5	
4	Tenaga PPPK	0	7	
5	Tenaga Upah	10	6	4 orang menjadi PPPK
JUMLAH		65	67	

Tabel 3. Jumlah Pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Org)						Jumlah (Org)
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
1	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
2	Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	5	20	4	3	-	34
3	Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial TLHK	2	3	10	-	2	-	17
4	Subbagian Tata Usaha	-	1	6	2	1	-	10
5	Tenaga Upah	-	-	3	-	3	-	6
Jumlah		4	9	39	6	9	-	67



Gambar 2. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Tk. Pendidikan

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang yang dimiliki oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2023 (bergerak dan tidak bergerak) senilai Rp2.740.618.611,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*). Rincian aset seperti tercantum pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Daftar Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023

PERKIRAAN NERACA / KELOMPOK BARANG SALDO PER 31 DESEMBER 2023		
KODE	URAIAN	NILAI (Rp.)
117111	Barang Konsumsi	1.000.000
132111	Peralatan dan Mesin	11.718.218.319
135121	Aset Tetap Lainnya	80.000.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-9.730.217.352
162151	Software	5.173.505.629
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	31.706.121.204
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.134.087.337
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	952.391.200
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	-1.119.039.204
169315	Akumulasi Amortisasi Software	-4.516.936.118
169317	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-31.706.121.204
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	-952.391.200
Jumlah		2.740.618.611

1.5 Permasalahan yang Sedang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah:

1. Reorganisasi KLHK

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah mempunyai kebijakan penyederhanaan birokrasi antara lain dengan pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang semula terdiri atas 4 (empat) Subdirektorat disederhanakan menjadi 2 (dua) Subdirektorat. Penyederhanaan tersebut menggabungkan beberapa tugas Subdirektorat. Adanya reorganisasi tersebut memberi dampak dalam pelaksanaan kegiatan karena perlu penyesuaian dalam proses bisnis dan prosedur operasional.

2. Perubahan Struktur Organisasi Direktorat IPSDH

Sesuai dengan Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor PT.130/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.3/12 2023 tanggal 8 Desember 2023 maka ditunjuklah Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor sebagai Pelaksana Tugas Direktur IPSDH, hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan jabatan Direktur pada Direktorat IPSDH, Direktur sebelumnya telah menjabat sebagai Sekretaris Utama pada Badan Informasi Geospasial.

3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan

- a. Permasalahan kegiatan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan yaitu data utama kegiatan ini adalah data penutupan lahan sehingga ketersediaan data penutupan lahan terupdate berpengaruh terhadap terbitnya Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan.
- b. Belum selesainya tahap pengembangan SIGAP Versi 2 secara swakelola yg telah dirancang sesuai Road Map pada tahun 2022, yang disebabkan oleh keterbatasan SDM sehingga menggantungkan pada tim teknis dari BIG dimana tim tersebut juga memiliki beban kerja internal yang harus diselesaikan.
- c. Masih terdapat data strategis yang belum lengkap atau belum tersedia di basis data geospasial KLHK, terutama untuk informasi detil *biodiversity*, serta masih terdapat beberapa IGT yang belum selesai diproduksi, belum diupload/disampaikan oleh Produsen DG ke basis data geospasial di Walidata Geospasial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi dan Misi Ditjen PKTL disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, Visi Ditjen PKTL yaitu: Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Di dalam Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020- 2024 Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Sejalan dengan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024, tugas dan fungsi Direktorat IPSDH mendukung Ditjen PKTL dalam mewujudkan **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Guna mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, dalam Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 telah ditetapkan kegiatan, sasaran dan output sebagaimana terinci pada tabel berikut. Target ini telah mengalami perubahan dari Renstra awal sesuai dengan konsep Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Tabel 5. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan nya data dan informasiSDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan(target kumulatif 5layanan) Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan (1 Layanan) Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
				Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (2 Layanan)
				Data dan Informasi Deforestasi Indonesia (1 Layanan)
			Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan informasi geospasial tematik LHK ((target kumulatif 5layanan)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran kegiatan **Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH** dan **Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK** ditetapkan untuk mendukung Sasaran program **Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dari Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**. Dengan dukungan output kegiatan tersebut diharapkan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Adapun target capaian Kinerja Kegiatan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasiSDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
	hutan							
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Layanan	2	2	2	2	2	10
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Layanan	1	1	1	1	1	5
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Layanan	1	1	1	1	1	5
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan DitjenPKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

2.2 Rencana Kerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan utama pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan 2020-2024, kegiatan Direktorat Inventarisasi dan

Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023 mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan
2. Tersedianya layanan informasi Geospasial Tematik LHK
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Secara rinci rencana kegiatan tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 7. Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2023

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/RO	Unit Kegiatan (Komponen)	Target 2023
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Sk dan Peta
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen
		052-Penyusunan Buku Deforestasi Indonesia	1 Dokumen
007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan		051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen
Tersedianya layanan informasi geospasial	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang	1 Layanan

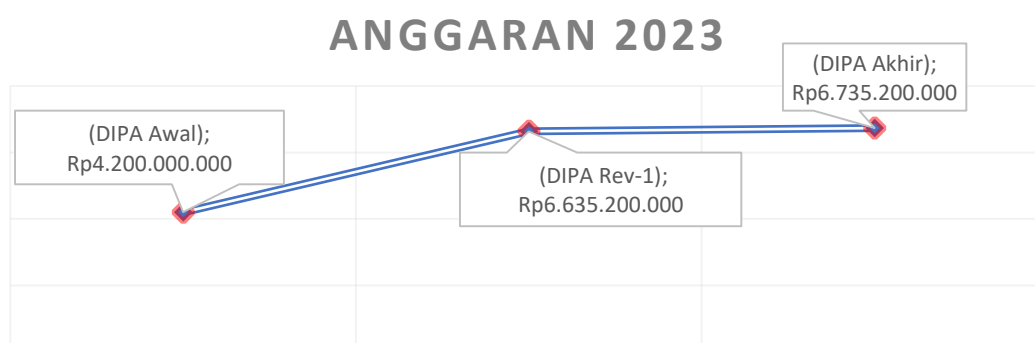
tematik LHK	Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL		
	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	058-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan
	951- Layanan Sarana Internal	052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	26 Unit

a. Rencana Kerja dan Anggaran

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan bagian dari Satker Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2023 tanggal 30 November 2022 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6.735.200.000,- dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp4.981.500.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp1.753.700.000
Jumlah	Rp6.735.200.000

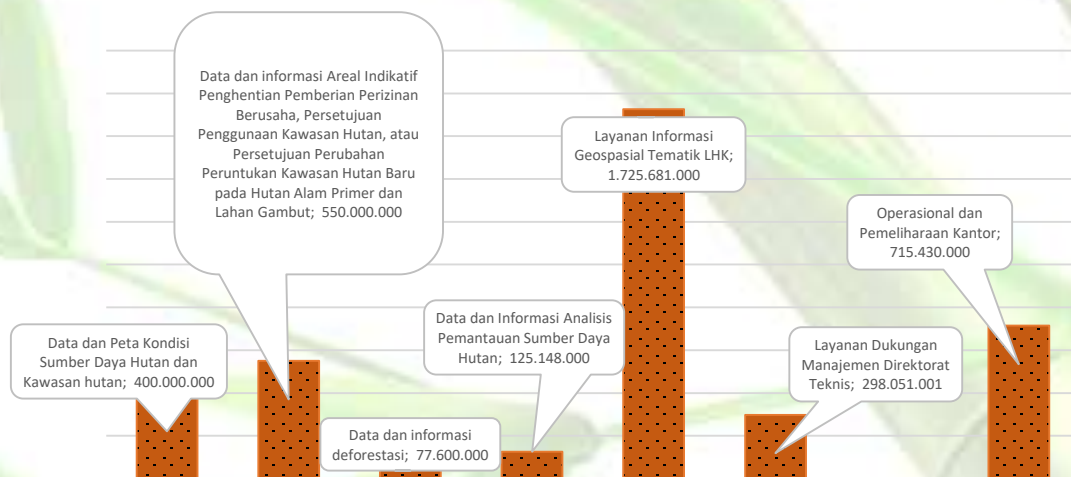
Anggaran tersebut merupakan revisi terakhir setelah adanya penambahan anggaran ABT PNBP PKH 2023 guna belanja modal Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi Sub Direktorat Pemantauan SDH dan Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial LHK sebanyak 26 Unit perangkat.



Gambar 3. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2023

Tabel 8. Alokasi Anggaran Tahun 2023

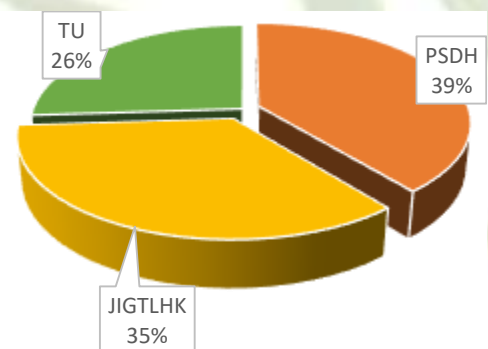
Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Jumlah Biaya
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	950.000.000 400.000.000
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	550.000.000
	005-Data dan informasi Areal Indikatif	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	2 SK dan Peta	375.000.000 280.295.000
	Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	1 Layanan	94.705.000
		Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut		
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1.056.500.000 1.056.500.000
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	250.000.000 250.000.000
	Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan 2.350.000.000
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL		1.753.700.000
		994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan 600.000.000
		962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	058-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan 700.000.000
		951- Layanan Sarana Internal	052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	26 Unit 453.700.000



Gambar 4. Alokasi Anggaran Per-IKK Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Tabel 9. Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023

SUB DIIT./ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN 2023	PERSEN ANGGARAN
PSDH	2.631.500.000	39,07
JDS	2.350.000.000	34,89
TU	1.753.700.000	26,03
JUMLAH	5.249.103.000	100,00



b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Selama periode 2023 Direktorat IPSDH telah 2 (dua) kali mengalami penyesuaian Perjanjian Kinerja:

1. Perubahan I pada bulan September 2023, penyesuaian ini terjadi dikarenakan adanya perubahan anggaran pada Direktorat IPSDH berupa penambahan anggaran pada Layanan Sarana dan Prasarana;

- Perubahan 2 pada bulan Desember 2023, penyesuaian ini terjadi karena adanya perubahan struktur organisasi yang berkaitan dengan pergantian pejabat definitif.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	VOLUME
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatkan pelayanan data dan informasi sumber daya hutan		
1.	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	3 Dokumen
		Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 Laporan
		Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta
		Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1 Dokumen
2.	Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Laporan
II.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK		
1.	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82 Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Level
		Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Efektifitas} \\ \text{Capaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektivitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan efektivitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna efektivitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan efektivitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Efektifitas} \\ \text{Capaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Sebelumnya}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2023. Mengacu pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023 maka kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2022 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	1 Layanan	100
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	007-Data dan Informasi	051-Penyusunan Data	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
	Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan			
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL				
	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	058-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	1 Layanan	100
	951- Layanan Sarana Internal	052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	26 Unit	26 Unit	100

Tabel 12. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2023

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	1 Layanan	1 Layanan	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Layanan	1 layanan	100
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	1 Layanan	100
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1 Layanan	1 Layanan	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Layanan	1 Layanan	100

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen	Nilai SAKIP Ditjen PKTL			
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100
	Layanan Sarana Internal	26 Unit	26 Unit	100

3.2.2 Efektivitas Capaian Kinerja

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2023 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2022.

Tabel 13. Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Capaian %		Efektifitas
		2022	2023	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	100	100	1
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	100	-
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	100	100	1
	Data dan informasi deforestasi	100	100	1
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Geospasial Tematik LHK	100	100	1
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
Tersedianya peta penetapan dan kelembagaan KPH	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	100	-	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
nMeningkatnya Tata	Nilai SAKIP Ditjen PKTL			

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Capaian %		Efektifitas
		2022	2023	
Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Layanan Perkantoran	100	100	1
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100	100	1
	Layanan Sarana Internal	-	100	-

Terdapat rincian output Tahun 2023 yang tidak memiliki perbandingan efektifitas pengukuran kinerja dengan tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan arsitektur kinerja pada tahun 2023. Rincian output yang sebelumnya tidak terdapat pada tahun 2022 adalah Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Layanan Sarana internal yang merupakan tambahan rincian output baru di tahun 2023.

3.2.3 Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	% Capaian Fisik Tahun 2023	% Capaian Keu Tahun 2023	Efisiensi %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumer	100	99,99	0,01
		Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumer	100	100	0
	Data dan informasi Areal Indikatif	Pengolahan Data dan Informasi	2 SK dan Peta	100	100	0

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	% Capaian Fisik Tahun 2023	% Capaian Keuangan Tahun 2023	Efisiensi %
	Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut				
		Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	100	100	0
	Data dan informasi deforestasi	Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumer	100	100	0
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber	Penyusunan Data dan Informasi Analisis	1 Dokumer	100	99,99	0,01

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	% Capaian Fisik Tahun 2023	% Capaian Keu Tahun 2023	Efisiensi %
	Daya Hutan	Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan informasi geospasial tematik LHK	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan	100	100	0
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL					
	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100	99,97	0,03
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	100	99,92	0,08
	Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	26 Unit	100	100	0
	Capaian Efisiensi %			100	99,99	0,01

Dari hasil analisa efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan antara capaian fisik dan capaian realisasi keuangan didapatkan nilai 0,01. Hal ini berarti bahwa capaian fisik lebih besar dibandingkan capaian realisasi keuangan dan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian output.

3.2.4 Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2020-2024

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Data Hutan telah sejalan dengan Renstra 2020-2024, hal tersebut tertuang pada table berikut:

Tabel 15. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 5 Tahun*	Realisasi Pertahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	10 Layanan	2	2	2	2	-	8	80
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	5 Layanan	1	1	1	1	-	4	80
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	83 Poin	79	80	81	82	-	82	98,79

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), hampir seluruh kegiatan rinci

tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan **Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan** adalah sebagai berikut:

3.3.1 IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan

Tabel 16. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	IKK	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Pada IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan terdapat target 3 dokumen yaitu Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan sebanyak 1 Dokumen dengan output telah Buku Potensi Sumber daya Hutan dan Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional sebanyak 2 Dokumen dengan output Buku rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Tabel 17. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2023		REALISASI		KETERANGAN PROGRES
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan	1 layanan		1 layanan	1.	Buku Rekalkulasi penutupan lahan tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2023		REALISASI		KETERANGAN PROGRES
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	
			dan Kawasan Hutan					2. Buku Rekalkulasi penutupan lahan tahun 2022
								3. Buku Potensi Sumber Daya Hutan Tahun 2022

1. Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan

Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP)* secara sistematis di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial. Data yang digunakan dalam analisis potensi sumber daya hutan Indonesia ini adalah data PSP hasil pengukuran tahun 1990-2022. Selama periode tersebut telah dibangun 4834 klaster TSP/PSP. Data yang digunakan dalam analisis adalah data plot PSP dari pengukuran yang terakhir.

Tabel 18. Jumlah klaster Inventarisasi Hutan Nasional sampai dengan Tahun 2023

Pulau Besar/Strata	Periode	Jumlah klaster
1. Bali-Nusa	1990–1996	74
	1997–2006	103
	2007–2016	139
	2017–2022	49
	Jumlah (1)	365
2. Jawa	1997–2006	6
	2007–2016	68
	2017–2022	49
	Jumlah (2)	123

Pulau Besar/Strata	Periode	Jumlah klaster
3. Kalimantan	1990–1996	844
	1997–2006	430
	2007–2016	292
	2017–2022	67
	Jumlah (3)	1633
4. Maluku	1990–1996	65
	1997–2006	8
	2007–2016	38
	2017–2022	21
	Jumlah (4)	132
5. Papua	1990–1996	355
	1997–2006	24
	2007–2016	87
	2017–2022	24
	Jumlah (5)	490
6. Sulawesi	1990–1996	290
	1997–2006	141
	2007–2016	276
	2017–2022	141
	Jumlah (6)	848
7. Sumatera	1990–1996	406
	1997–2006	233
	2007–2016	271
	2017–2022	155
	Jumlah (7)	1065
8. Mangrove	2017–2022	178
	Jumlah (8)	178
Total		4834

Dari data pengukuran tersebut dilakukan analisis kerapatan jenis pohon, basal area, volume tegakan dan biomasa tegakan pohon pada tipe penutupan hutan lahan kering dan hutan rawa.

Tabel 19. Potensi Tegakan hutan berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Nasional

Periode	Strata	Jumlah	Volume (m ³ /ha), DBH ≥20 cm					CV	E
		sampel	Rerata	Sd	Se	SK 95%	(%)	(%)	
1990–1996	1. Bali-Nusa	72	135.12	124.34	14.65	105.92	– 164.32	92.0	21.6
	3. Kalimantan	819	182.99	136.45	4.77	173.63	– 192.35	74.6	5.1
	4. Maluku	65	148.02	102.45	12.71	122.64	– 173.40	69.2	17.1
	5. Papua	346	161.74	106.98	5.75	150.43	– 173.05	66.1	7.0
	6. Sulawesi	283	204.20	133.05	7.91	188.63	– 219.77	65.2	7.6

Periode	Strata	Jumlah	Volume (m³/ha), DBH ≥20 cm					CV	E
		sampel	Rerata	Sd	Se	SK 95%	(%)	(%)	
1997–2006	7. Sumatera	394	190.10	139.37	7.02	176.30	– 203.90	73.3	7.3
	1. Bali-Nusa	102	141.51	130.00	12.87	115.98	– 167.04	91.9	18.0
	2. Jawa	6	167.97	154.26	62.98	13.86	– 322.08	91.8	91.7
	3. Kalimantan	417	172.44	140.32	6.87	158.94	– 185.94	81.4	7.8
	4. Maluku	8	125.31	82.33	29.11	58.18	– 192.44	65.7	53.6
	5. Papua	24	148.50	103.35	21.10	104.95	– 192.05	69.6	29.3
	6. Sulawesi	141	231.54	145.76	12.28	207.26	– 255.82	63.0	10.5
2007–2016	7. Sumatera	223	162.39	129.82	8.69	145.26	– 179.52	79.9	10.5
	1. Bali-Nusa	139	227.07	141.61	12.01	203.32	– 250.82	62.4	10.5
	2. Jawa	68	214.47	157.44	19.09	176.38	– 252.56	73.4	17.8
	3. Kalimantan	292	218.75	115.70	6.77	205.43	– 232.07	52.9	6.1
	4. Maluku	38	208.99	67.71	10.98	186.76	– 231.22	32.4	10.6
	5. Papua	87	212.64	91.93	9.86	193.04	– 232.24	43.2	9.2
	6. Sulawesi	276	201.61	141.81	8.54	184.80	– 218.42	70.3	8.3
2017–2022	7. Sumatera	271	264.47	145.06	8.81	247.13	– 281.81	54.8	6.6
	1. Bali-Nusa	49	253.88	163.19	23.31	207.04	– 300.72	64.3	18.5
	2. Jawa	49	238.53	148.01	21.14	196.05	– 281.01	62.1	17.8
	3. Kalimantan	67	232.75	133.35	16.29	200.24	– 265.26	57.3	14.0
	4. Maluku	21	255.14	103.98	22.69	207.95	– 302.33	40.8	18.5
	5. Papua	24	298.30	138.42	28.25	239.99	– 356.61	46.4	19.5
	6. Sulawesi	141	231.75	129.26	10.89	210.22	– 253.28	55.8	9.3
	7. Sumatera	155	255.77	139.70	11.22	233.61	– 277.93	54.6	8.7

Tabel 20. Data Pelaksanaan Klaster 2023

NO	ID KLASER				BPKHTL	NO KLASER BPKHTL	PROVINSI	KABUPATEN	KEGIATAN ENU / RE	TAHU N
	ZONE	S_N	X	Y						
1	47	N	490	0210	BPKHTL I MEDAN		SUMUT	TAPANULI UTARA	ENU	2023
2	47	N	520	0230	BPKHTL I MEDAN		SUMUT	TAPANULI UTARA	ENU	2023
3	48	S	350	9565	BPKHTL II PALEMBANG		SUMSEL	MUARA ENIM	ENU	2023
4	48	S	340	9515	BPKHTL II PALEMBANG		SUMSEL	BANYUASIN	ENU	2023
5	48	S	275	9560	BPKHTL II PALEMBANG		SUMSEL	EMPAT LAWANG	ENU	2023
6	48	S	335	9520	BPKHTL II PALEMBANG		SUMSEL	MUARA ENIM	ENU	2023
7	48	S	310	9740	BPKHTL II PALEMBANG		SUMSEL	BANYUASIN	ENU	2023
8	49	S	320	9930	BPKHTL III PONTIANAK	339	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
9	49	S	330	9935	BPKHTL III PONTIANAK	343	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
10	49	S	330	9940	BPKHTL III PONTIANAK	342	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
11	49	S	345	9930	BPKHTL III PONTIANAK	337	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
12	49	S	350	9910	BPKHTL III PONTIANAK	341	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
13	49	S	350	9915	BPKHTL III PONTIANAK	340	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
14	49	S	350	9930	BPKHTL III PONTIANAK	338	KALBAR	KUBU RAYA	ENU	2023
15	50	N	500	0040	BPKHTL IV SAMARINDA	241.F	KALTIM	KUTAI TIMUR	ENU	2023
16	50	N	545	0440	BPKHTL IV SAMARINDA	290.A	KALTARA	NUNUKAN	ENU	2023

NO	ID KLASER				BPKHTL	NO KLASTER BPKHTL	PROVINSI	KABUPATEN	KEGIATAN	TAHU N
	ZONE	S_N	X	Y					ENU / RE	
17	50	S	425	9610	BPKHTL V BANJARBARU		KALSEL	KOTABARU	ENU	2023
18	50	S	400	9670	BPKHTL V BANJARBARU		KALSEL	KOTABARU	ENU	2023
19	50	S	420	9720	BPKHTL V BANJARBARU		KALSEL	KOTABARU	ENU	2023
20	50	S	380	9720	BPKHTL V BANJARBARU		KALSEL	KOTABARU	ENU	2023
21	50	S	380	9710	BPKHTL V BANJARBARU		KALSEL	KOTABARU	RE	2023
22	52	S	315	9955	BPKHTL VI MANADO	6	MALUT	HALMAHERA SELATAN	ENU	2023
23	51	S	170	9720	BPKHTL VII MAKASSAR	233	SULSEL	LUWU UTARA	ENU	2023
24	50		290	9075	BPKHTL VIII DENPASAR		BALI	TABANAN	RE	2023
25	50		645	9040	BPKHTL VIII DENPASAR		NTB	DOMPU	RE	2023
26	50		620	9050	BPKHTL VIII DENPASAR		NTB	SUMBAWA	RE	2023
27	50		655	9025	BPKHTL VIII DENPASAR		NTB	SUMBAWA	RE	2023
28	50		330	9085	BPKHTL VIII DENPASAR		BALI	KARANGASEM	RE	2023
29	53	S	455	9345	BPKHTL IX AMBON		MALUKU	KEPULAUAN ARU	ENU	2023
30	53	S	670	9755	BPKHTL X JAYAPURA		PAPUA	WAROPEN	ENU	2023
31	49		815	9070	BPKHTL XI YOGYAKARTA	155	JATIM	JEMBER	RE	2023
32	49		810	9070	BPKHTL XI YOGYAKARTA	154	JATIM	JEMBER	RE	2023
33	49		670	9145	BPKHTL XI YOGYAKARTA	241	JATIM	MOJOKERTO	RE	2023
34	50		210	9135	BPKHTL XI YOGYAKARTA	291	JATIM	SITUBONDO	RE	2023
35	50		205	9135	BPKHTL XI YOGYAKARTA	290	JATIM	SITUBONDO	RE	2023
36	49		190	0445	BPKHTL XII TANJUNGPINANG	L.86	KEPRI	NATUNA	ENU	2023
37	49		190	0415	BPKHTL XII TANJUNGPINANG	L.75	KEPRI	NATUNA	ENU	2023
38	48	S	775	9680	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	230	BABEL	BELITUNG	ENU	2023
39	48	S	810	9705	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	184	BABEL	BELITUNG	RE	2023
40	48	S	815	9660	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	232	BABEL	BELITUNG	ENU	2023
41	48	S	180	9730	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	161	JAMBI	MERANGIN	RE	2023
42	48	S	170	9710	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	177	JAMBI	MERANGIN	RE	2023
43	48	S	815	9710	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	182	BABEL	BELITUNG	RE	2023
44	51	S	335	9040	BPKHTL XIV KUPANG		NTT	ENDE	ENU	2023
45	51	S	700	8985	BPKHTL XIV KUPANG		NTT	BELU	ENU	2023
46	51	S	340	9040	BPKHTL XIV KUPANG		NTT	ENDE	ENU	2023
47	51	N	365	0075	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTA LO	POHUWATO	ENU	2023
48	51	N	375	0075	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTA LO	POHUWATO	ENU	2023
49	51	N	370	0075	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTA LO	POHUWATO	ENU	2023
50	51	N	395	0060	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTA LO	POHUWATO	ENU	2023
51	51	N	415	0090	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTA LO	BOALEMO	ENU	2023

NO	ID KLASER				BPKHTL	NO KLASTER BPKHTL	PROVINSI	KABUPATEN	KEGIATAN	TAHU N
	ZONE	S_N	X	Y					ENU / RE	
52	51	N	430	0105	BPKHTL XV GORONTALO		GORONTALO	GORONTALO UTARA	ENU	2023
53	51	N	290	0080	BPKHTL XVI PALU	7	SULTENG	BUOL	ENU	2023
54	51	S	310	9000	BPKHTL XVI PALU	14	SULTENG	BUOL	ENU	2023
55	51	N	280	0110	BPKHTL XVI PALU	6	SULTENG	BUOL	ENU	2023
56	51	N	270	0080	BPKHTL XVI PALU	1	SULTENG	BUOL	ENU	2023
57	51	N	260	0080	BPKHTL XVI PALU	34	SULTENG	TOLI-TOLI	ENU	2023
58	51	N	190	0070	BPKHTL XVI PALU	54	SULTENG	TOLI-TOLI	ENU	2023
59	53	S	365	9765	BPKHTL XVII MANOKWARI		PABAR	TELUK BINTUNI	ENU	2023
60	46	N	794	0609	BPKHTL XVIII BANDA ACEH		ACEH	ACEH UTARA	ENU	2023
61	48		340	9960	BPKHTL XIX PEKANBARU	L.57	RIAU	INDRAGIRI HILIR	ENU	2023
62	48	S	440	9455	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	316	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	RE	2023
63	48	S	455	9450	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	304	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	RE	2023
64	48	S	335	9480	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	381	BENGKULU	KAUR	ENU	2023
65	48	S	330	9515	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	380	BENGKULU	KAUR	ENU	2023
66	48	S	315	9515	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	379	BENGKULU	KAUR	ENU	2023
67	48	S	310	9515	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	378	BENGKULU	KAUR	ENU	2023
68	49	S	560	9720	BPKHTL XXI PALANGKARAYA		KALTENG	KOTAWARINGIN BARAT	ENU	2023
69	51	S	380	9660	BPKHTL XXII KENDARI	75	SULTRA	KONAWA	RE	2023
70	51	S	420	9640	BPKHTL XXII KENDARI	70	SULTRA	KONAWA UTARA	RE	2023
71	51	S	420	9650	BPKHTL XXII KENDARI	74	SULTRA	KONAWA UTARA	RE	2023
72	51	S	440	9530	BPKHTL XXII KENDARI	24	SULTRA	KONAWA SELATAN	RE	2023

2. Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional

Rekalkulasi penutupan lahan dimaksudkan untuk menyajikan data kondisi penutupan lahan terbaru pada kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) dan bukan kawasan hutan (areal penggunaan lain - APL) di daratan Indonesia sebagai bahan dalam pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*), mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan Informasi Geospasial Penutupan Lahan memotret kondisi termutakhir penutupan lahan berdasarkan kenampakan pada citra penginderaan jauh. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan informasi bagi pengambil kebijakan, perencana, analis,

akademisi, dan masyarakat umum. Informasi Geospasial Penutupan Lahan yang berkelanjutan dapat memberikan gambaran umum kondisi dinamika hutan di lapangan termasuk permasalahannya. Permasalahan yang timbul selanjutnya, antara lain berupa tingginya dinamika tutupan hutan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan, pada akhirnya mengakibatkan degradasi kondisi hutan Indonesia dan pengurangan luas liputannya.



Gambar 5. Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990-2022

Informasi Geospasial Penutupan Lahan yang tersedia secara berkelanjutan kemudian dapat dianalisis lebih lanjut untuk berbagai kepentingan, antara lain perhitungan deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penghitungan angka deforestasi Indonesia secara periodik dan berkelanjutan, dimulai sejak periode pengamatan tahun 1990. Hasil pengamatan secara berkelanjutan dapat diamati pada perkembangan deforestasi Indonesia mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 6. Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2022

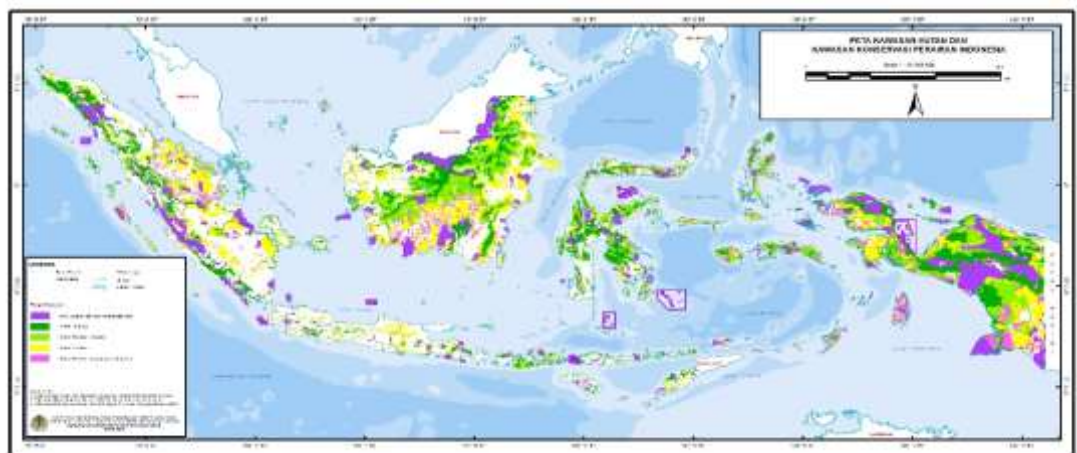
Data citra penginderaan jauh yang dipergunakan dalam kegiatan *Update* Penutupan Lahan tingkat Nasional tahun 2022 adalah citra Landsat 8 OLI atau juga dikenal sebagai *Landsat Data Continuity Mission* (LDCM) dengan dibantu beberapa jenis citra satelit lain sebagai pelengkap, antara lain Sentinel dan SPOT. Data Landsat 8 OLI yang dipergunakan sebagai rujukan delineasi penutupan adalah data Landsat terbaik (liputan awan paling sedikit) yang dikumpulkan dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, yang kemudian dijadikan mosaik citra untuk menghasilkan kenampakan citra Landsat seluruh Indonesia.

Mosaik Citra Landsat 8 OLI ini disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Liputan Mosaik Citra Landsat 8 OLI adalah sebagaimana disajikan pada Gambar 7:



Gambar 7. Mosaik Citra Landsat 8 OLI Tahun 2022

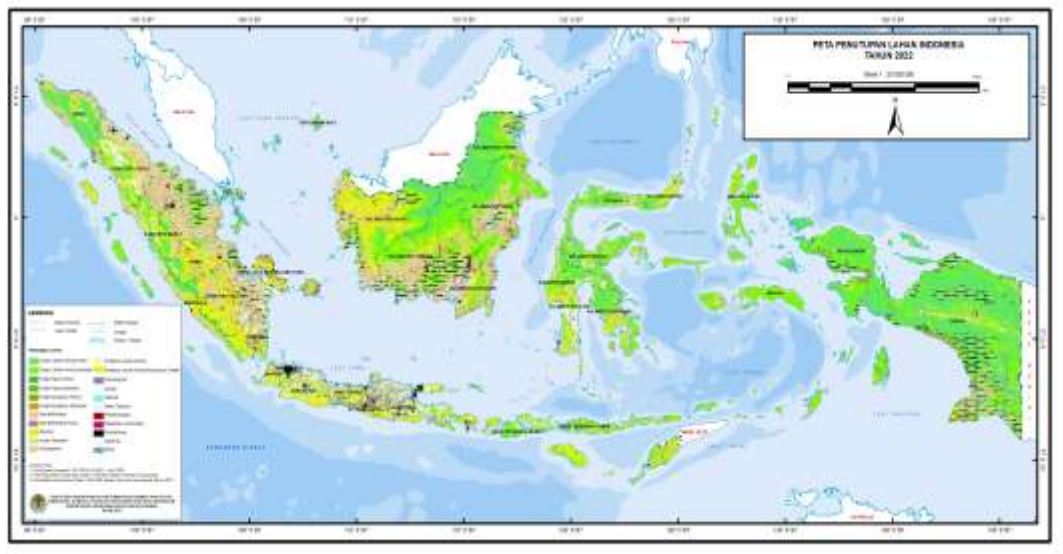
IGD yang dipergunakan dalam pemetaan penutupan lahan nasional adalah Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:250.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial pada bulan Juli 2021 dan diunduh dari basis data JIG LHK pada Februari 2022



Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022

Rekalkulasi penutupan lahan dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha, yaitu pada 7 (tujuh) kelompok pulau/kepulauan besar atau 34 provinsi, yang terdiri atas kawasan hutan daratan seluas 118,4 juta ha atau 63,1 % dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,3 juta ha atau 36,9 % (Tabel III. 1). Sebagai catatan kami informasikan bahwa tubuh air (danau, sungai besar, kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan. Salah satu

hasil rekalkulasi penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022 dilengkapi dengan analisis terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia yang tersaji pada gambar berikut:



Gambar 9. Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia



Gambar 10. Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan

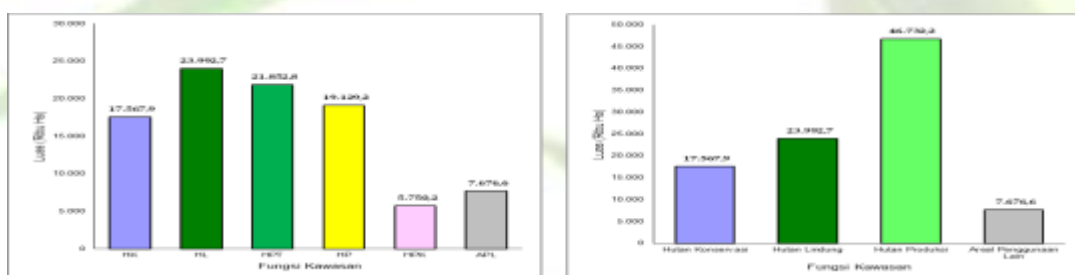
Berdasarkan fungsi kawasan hutan, penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan konservasi sebesar 17,6 juta ha (9,4 %) dan tidak berhutan sebesar 4,2 juta ha (2,2 %), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung sebesar 24,0 juta ha (12,8 %) dan tidak berhutan sebesar 5,3 juta ha (2,8 %), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan produksi sebesar 46,7 juta ha (24,9 %) dan tidak berhutan sebesar 20,4 juta ha (10,9 %). Sedangkan lahan berhutan pada areal penggunaan lain seluas 7,7 juta ha (4,1 %) dan tidak berhutan seluas 61,7 juta ha

(32,9 %). Persentase dihitung berdasarkan luas total masing-masing fungsi kawasan hutan. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Sebaran Penutupan Lahan di di Indonesia

NO	PENUTUPAN LAHAN	LUAS PER FUNGSI (RibU Ha)	LAHAN BERHUTAN		LAHAN TIDAK BERHUTAN	
			Luas (RibU Ha)	%	Luas (RibU Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.782,9	17.567,9	9,4	4.215,0	2,2
2	Kawasan Hutan Lindung	29.248,1	23.992,7	12,8	5.255,5	2,8
3	Kawasan Hutan Produksi					
	a. HPT	26.759,5	21.852,8	11,6	4.906,7	2,6
	b. HP	29.188,6	19.129,2	10,2	10.059,4	5,4
	c. HPK	11.215,6	5.750,2	3,1	5.465,4	2,9
	sub Total	67.163,6	46.732,2	24,9	20.431,4	10,9
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	118.194,7	88.292,8	47,1	29.901,9	15,9
4	Areal Penggunaan Lain	69.393,0	7.676,6	4,1	61.716,4	32,9
	Total (1+ 2 + 3 + 4)	187.587,6	95.969,4	51,2	91.618,3	48,8

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.



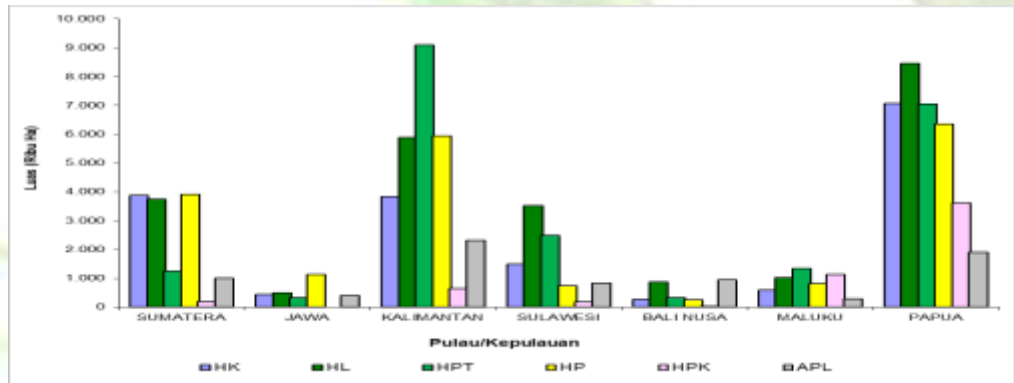
Gambar 112. Diagram Penutupan Lahan Berhutan di dalam dan di luar Kawasan Hutan Seluruh Indonesia

Sebaran penutupan lahan berhutan berdasarkan kawasan hutan daratan menurut kelompok pulau/kepulauan besar, yang terluas terdapat di Papua yaitu seluas 34,4 juta ha atau 35,9 % dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar 96,0 juta ha, berikutnya Kalimantan seluas 27,7 juta ha (28,9 %), sedangkan luas terkecil adalah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas 2,7 juta ha (2,8 %). Pulau-pulau yang lain memiliki luas penutupan lahan berhutan kurang dari 15,0 %.

Tabel 22. Penutupan Lahan Berhutan pada 7 Kelompok Pulau / Kepulauan Besar (RibU Ha)

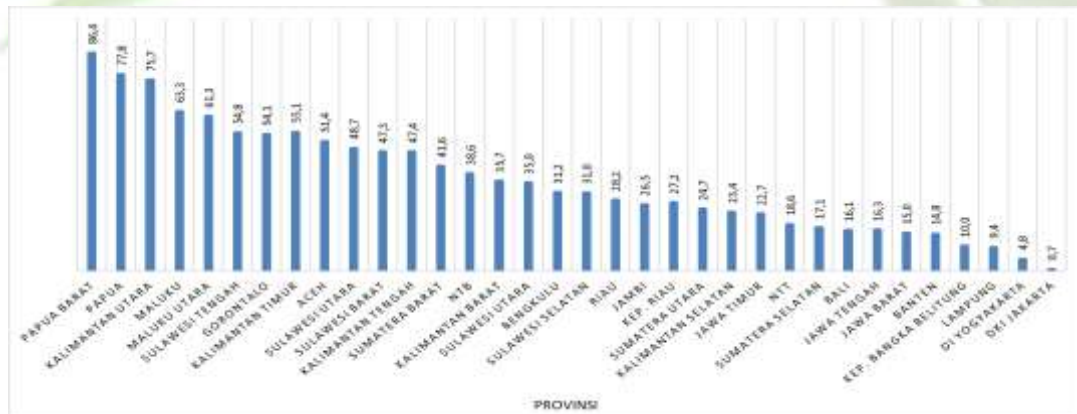
NO.	PULAU/ KEPULAUAN	BERHUTAN							APL	TOTAL	
		KAWASAN HUTAN					HPK	Jumlah		JUMLAH	%
		HUTAN TETAP									
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah					
1	SUMATERA	3.880,3	3.736,1	1.250,8	3.902,7	12.770,0	186,3	12.956,3	997,5	13.953,7	14,5
2	JAWA	437,8	500,1	320,4	1.128,5	2.386,8	-	2.386,8	401,9	2.788,7	2,9
3	KALIMANTAN	3.833,7	5.890,1	9.095,5	5.948,5	24.767,8	636,6	25.404,5	2.314,7	27.719,2	28,9
4	SULAWESI	1.497,7	3.513,0	2.474,9	738,1	8.223,7	167,4	8.391,1	837,4	9.228,6	9,6
5	BALI NUSATGR	266,3	874,8	326,4	255,0	1.722,5	20,8	1.743,3	946,9	2.690,2	2,8
6	MALUKU	583,5	1.013,9	1.331,4	803,4	3.732,3	1.123,2	4.855,5	280,1	5.135,6	5,4
7	PAPUA	7.068,6	8.464,6	7.053,3	6.352,9	28.939,4	3.615,9	32.555,4	1.898,1	34.453,4	35,9
	Total	17.567,9	23.992,7	21.852,8	19.129,2	82.542,6	5.750,2	88.292,8	7.676,6	95.969,4	100,0

Ket. Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan)) tidak termasuk dalam penghitungan.



Gambar 12. Diagram Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar

Persentase luas penutupan lahan berhutan di dalam kawasan hutan terhadap luas total daratan pada masing-masing provinsi disajikan pada Gambar 2.



Gambar 3. Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan Per Provinsi

3.3.2 IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Tabel 23. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Tabel 24. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	DIPA TAHUN 2023		REALISASI		
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	KETERANGAN
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	layanan	1	layanan	1. Telah terbit Buku NSDH Tahun 2023 2. Telah disusun Laporan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

A. Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

1. Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Neraca Sumber Daya Hutan adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan. NSDH 2023 disajikan dengan menampilkan saldo awal (besaran tahun 2021) dan saldo akhir (besaran tahun 2022). Data yang disajikan dalam NSDH 2023 tersebut diantaranya berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi. Dimulai dari NSDH 2022 prosedur perhitungan luasan diselenggarakan dengan perhitungan luasan dalam Rekalkulasi Penutupan Lahan tahun 2021, yang didasarkan murni dari perhitungan berdasarkan perhitungan pada basis data geospasial kawasan hutan dan penutupan lahan.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka luas kawasan hutan Indonesia (yang berupa daratan) pada tahun 2022 adalah 118,2 juta ha. Luas tersebut terbagi ke dalam masing-masing fungsinya, diantaranya Hutan Konservasi (HK) dengan luasan 21,8 juta ha, Hutan Lindung (HL) dengan luasan 29,2 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 26,8 juta ha, Hutan Produksi (HP) dengan luasan 29,2 juta ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan 11,2 juta ha. Secara Nasional, luas kawasan hutan mengalami defisit sebesar 170,8 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal luas awal sebesar 118,4 juta ha. Perubahan luas ini terjadi pada HK dengan kenaikan

sebesar 1,5 ribu ha, HL mengalami penurunan sebesar 15,3 ribu ha, HPT mengalami penurunan sebesar 32,2 ribu ha, HP mengalami penurunan sebesar 4,9 ribu ha, dan HPK mengalami penurunan sebesar 119,9 ribu ha.

Secara nasional, pada Tahun 2022 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 96 juta ha atau sebesar 51,2 % dari total daratan. Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 104,5 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2021), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 88,4 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2022), penutupan hutan sebesar 88,3 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan sebesar 74,3 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal.

Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu (m^3) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2021) neraca potensi kayu sebesar 12.842,3 juta m^3 dan saldo akhir (kondisi tahun 2022) sebesar 12.827,5 juta m^3 , sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 14,8 juta m^3 . Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.126,2 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.119,5 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 6,7 Triliun.

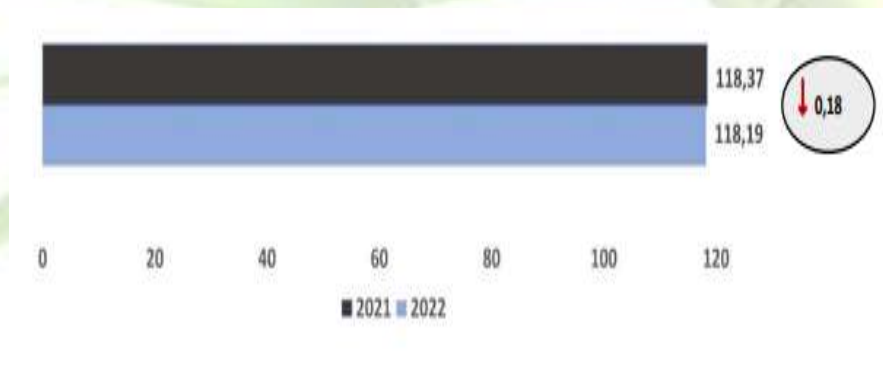


Buku Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2023

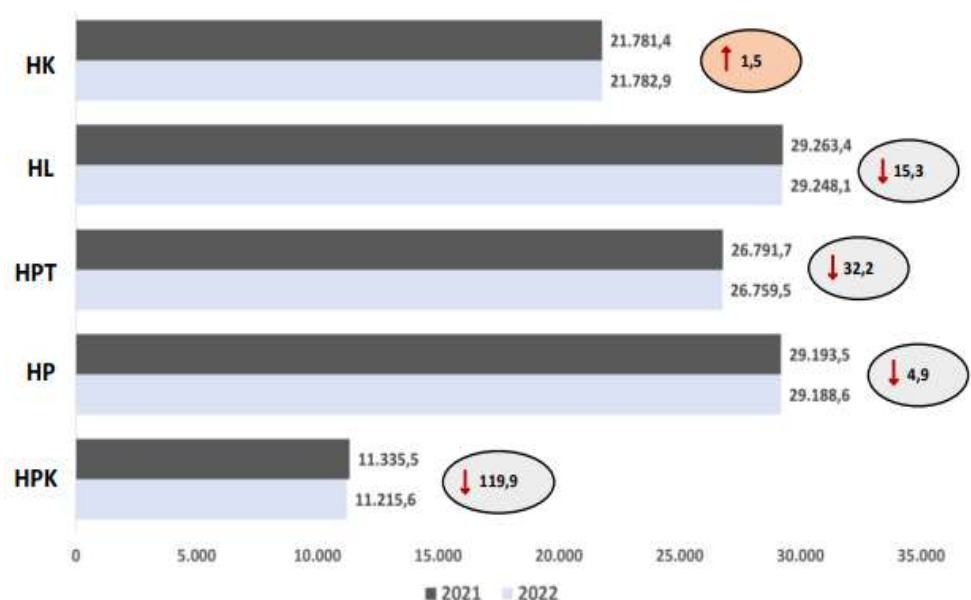


Gambar 14. Neraca Sumber Daya Hutan Indonesia

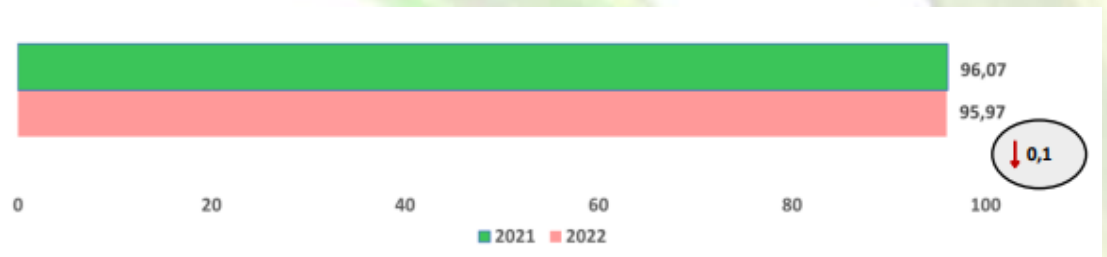
Hasil kegiatan inventarisasi sumber daya hutan yang kemudian dihitung dan disajikan dalam Neraca Sumber Daya Hutan merupakan gambaran atas kondisi dugaan sumber daya hutan. NSDH terbagi ke dalam dua bagian diantaranya adalah neraca sumber daya lahan yang terdiri dari neraca kawasan hutan dan neraca penutupan hutan, serta neraca sumber daya kayu yang terdiri dari neraca potensi kayu dan neraca potensi moneter kayu. Secara rinci disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 15. Neraca Kawasan Hutan Indonesia (Juta ha)



Gambar 16. Neraca Kawasan Hutan per Fungsi Kawasan Hutan (Ribu ha)



Gambar 17. Neraca Penutupan Hutan Indonesia (Juta ha)



Gambar 18. Neraca Penutupan Hutan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Rib. ha)



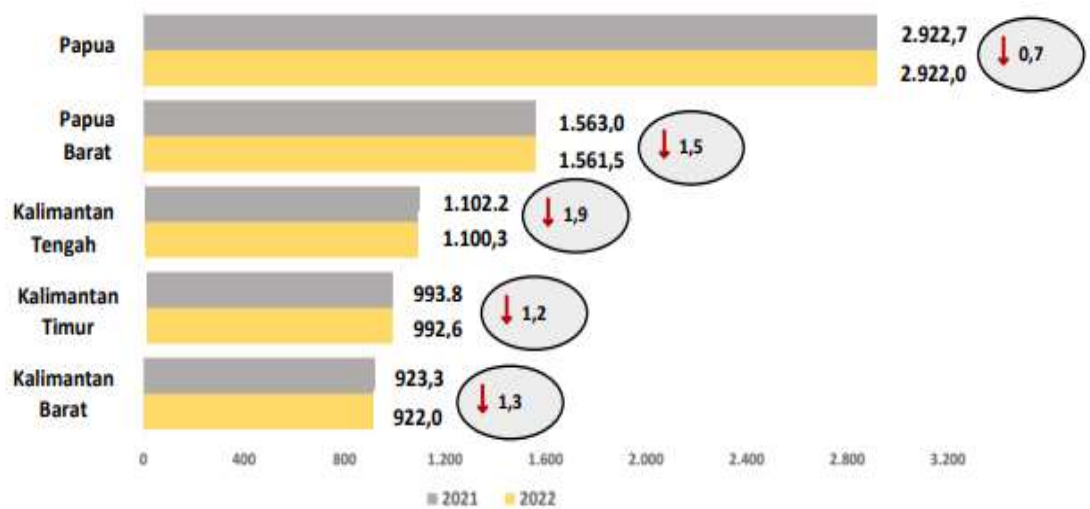
Gambar 19. Neraca Penutupan Hutan Terbesar di Lima Provinsi (Ribu ha)



Gambar 20. Neraca Potensi Kayu di Indonesia (Juta m³)



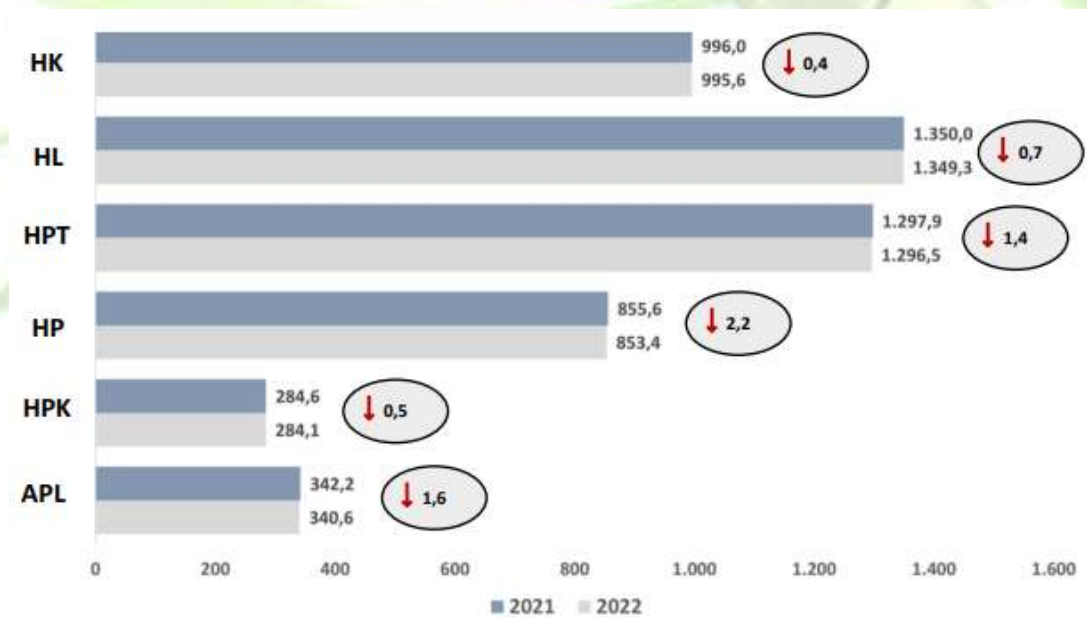
Gambar 21. Neraca Potensi Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Juta m³)



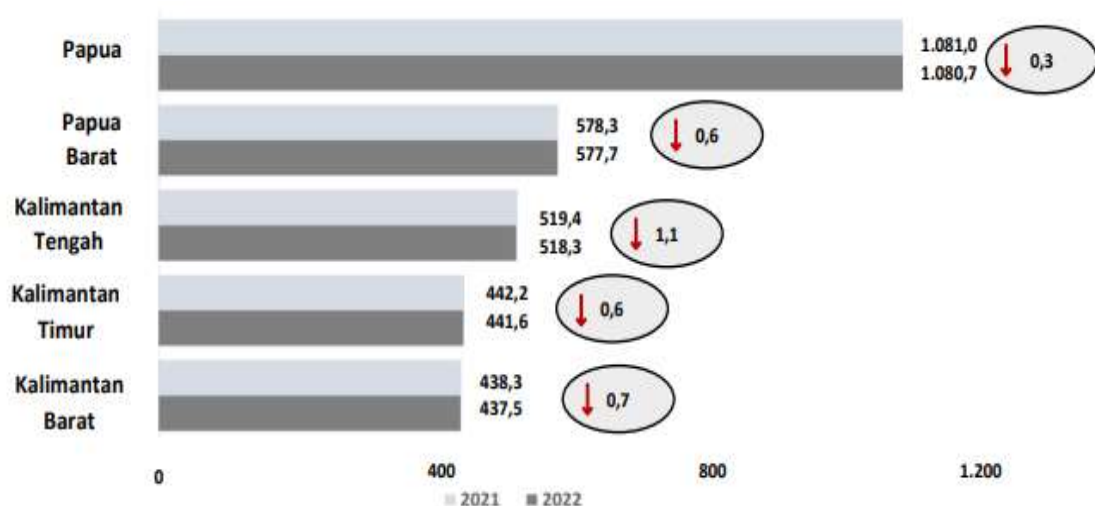
Gambar 22. Neraca Potensi Kayu Terbesar di Lima Provinsi (Juta m³)



Gambar 23. Neraca Potensi Moneter Kayu di Indonesia



Gambar 24. Neraca Moneter Kayu di Dalam dan Luar Kawasan Hutan (Rp. Triliun)



Gambar 25. Neraca Potensi Moneter Kayu Terbesar di Lima Provinsi (Rp. Triliun)

2. Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 terkait kegiatan pemantauan hutan yang meliputi analisis multitemporal (dengan penggunaan data tahun 2021 dan tahun 2022) dan multitingkat (dengan tingkat DAS, KPH dan pengelolaan hutan) beserta penyebarluasan data dan informasi secara periodik dan terkini sebagai bahan perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan yang sudah dilaksanakan. Penyediaan data dan informasi yang terkini (*up to dated*) menjadi hal penting untuk menekan informasi yang tidak sepadan (*asysmetric information*) dalam mencapai pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*). Dengan demikian sebagai tujuan utama adalah mengetahui kondisi hutan terkini dari aktifitas pengelolaan hutan melalui kegiatan pemantauan dengan tujuan spesifik sebagai berikut;

- Mengetahui kondisi terkini penutupan hutan tingkat DAS, KPH dan Pengelolaan Hutan.
- Mengetahui kondisi terkini penutupan non-hutan tingkat DAS, KPH dan Pengelolaan Hutan.
- Mengetahui kondisi terkini penambahan atau pengurangan penutupan hutan tingkat DAS, KPH dan Pengelolaan Hutan.

Sasaran yang dicapai adalah tersedianya data dan informasi penutupan hutan, non-hutan dan penambahan atau pengurangan pada tahun 2021 – 2022 pada tingkat DAS, KPH dan unit pengelolaan hutan bagi pengambil keputusan, perencana, pengawas, dan pengelola hutan.

3.3.3 IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Tabel 25. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya	Data dan informasi Areal Indikatif	Pengolahan Data dan Informasi Areal	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
data dan informasi SDH	Penghentian	Indikatif			
	Pemberian	Penghentian			
	Perizinan	Pemberian Perizinan			
	Berusaha,	Berusaha,			
	Persetujuan	Persetujuan			
	Penggunaan	Penggunaan			
	Kawasan Hutan, atau	Kawasan Hutan, atau			
	Persetujuan	Persetujuan			
	Perubahan	Perubahan			
	Peruntukan	Peruntukan Kawasan			
	Kawasan Hutan Baru pada	Hutan Baru pada			
	Hutan Alam Primer dan	Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
	Lahan Gambut	Pelayanan	1 Layanan	1 Layanan	100
		Permohonan Revisi			
		Areal Indikatif			
		Penghentian			
		Pemberian Perizinan			
		Berusaha,			
		Persetujuan			
		Penggunaan			
		Kawasan Hutan, atau			
		Persetujuan			
		Perubahan			
		Peruntukan Kawasan			
		Hutan Baru pada			
		Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			

Tabel 26. Progres Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	DIPA TAHUN 2023		REALISASI		
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	KETERANGAN PROGRES
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan	2	layanan	2	layanan	Telah terbit SK 3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.I/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 ttg Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I.

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	DIPA TAHUN 2023		REALISASI		
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	KETERANGAN PROGRES
			Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut					Telah terbit SK 12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 ttg Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.

1. Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, berawal dari Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah diperpanjang melalui Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kebijakan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan” menjadi “Penghentian” maka pada areal terindikasi berupa hutan alam primer dan lahan gambut tidak boleh diberikan izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus penyesuaian nomenklatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) dan melakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah

non kementerian terkait.

Pada tahun 2023, telah dilakukan proses pemutakhiran PIPPIB terdapat dua kali proses revisi PIPPIB sebagaimana amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 untuk merevisi PIPPIB tiap 6 (enam) bulan sekali. penyusunan data dan informasi dapat berjalan sehingga dapat ditetapkan dua Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.3554/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode I dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Peta Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.

Hasil penetapan areal revisi PIPPIB Tahun 2023 menunjukkan angka luasan yang masih konsisten pada angka 66 juta hektar. Perkembangan lebih detail dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 26. Grafik Perkembangan Luas Areal PIPPIB

Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Data dan Informasi mengenai PIPPIB disebarluaskan melalui beberapa pranala seperti Kebijakan Satu Peta dan Sistem Informasi Geospasial KLHK (SIGAP KLHK). Namun, informasi yang disajikan pada SIGAP KLHK terbatas pada Surat Keputusan Menteri dan peta cetak. Data spasial PIPPIB belum terakomodir di dalamnya.



Gambar 27 . PIPPIB Tahun 2023 di SIGAP KLHK

Perubahan luas setiap periode revisi PIPPIB ditahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 27 dan Tabel 28. Terdapat keterangan perubahan luas PIPPIB pada kedua periode tersebut. Pada penetapan PIPPIB Tahun 2023 Periode I terdapat penambahan luas ± 209.295 Ha, sedangkan pada penetapan PIPPIB Tahun 2023 Periode I terdapat pengurangan luas ± 60.668 Ha.

Tabel 27. Perubahan luas PIPPIB Tahun 2023 Periode I terhadap periode sebelumnya

NO.	FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN	LUAS (Ha)
PENGURANGAN		-53.882
1.	Konfirmasi Perizinan dan/atau Alas Hak yang terbit sebelum Tahun 2011 Masukan dari masyarakat/badan usaha/pemerintah tentang perizinan dan/atau penguasaan lahan terdiri dari Perizinan, Persetujuan, HGU, SHM, SKGR, SKT, legalisasi aset, dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Inpres Nomor 10 Tahun 2011 dan/atau sebelum SK Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Minhut-II/2011	-2.619
2.	Pemutakhiran Data Perizinan Pemutakhiran data IGT Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	-10
3.	Perubahan Tata Ruang Kehutanan Pemutakhiran data kawasan hutan (perkembangan pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPKH), penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH/TORA), dll)	-41.875
4.	Laporan Survei Lahan Gambut Hasil pelaksanaan survei lahan gambut	-892
5.	Laporan Survei Hutan Alam Primer Hasil pelaksanaan survei hutan alam primer	-8.426
PENAMBAHAN		+263.117
1.	Pemutakhiran Data Perizinan Pemutakhiran data IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) - PBPH yang telah berakhir/dicabut iznnya dengan kondisi berupa lahan gambut - PBPH yang telah berakhir/dicabut iznnya dengan kondisi berupa hutan alam primer	+257.603
2.	Perubahan Tata Ruang Kehutanan Pemutakhiran data kawasan hutan (perkembangan pengukuhan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PPKH), dll)	+5.514
JUMLAH		+209.295

Tabel 28. Perubahan luas PIPPIB Tahun 2023 Periode II terhadap periode sebelumnya

NO.	FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN	LUAS (Ha)
PENGURANGAN		-91.629
1.	Konfirmasi Perizinan dan/atau Alas Hak yang terbit sebelum Tahun 2011 Masukan dari masyarakat/badan usaha/pemerintah tentang perizinan dan/atau penguasaan lahan yang terdiri dari Perizinan, Persetujuan, HGU, SHM, SKGR, SKT, legalisasi aset, dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 dan/atau sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.232/Minhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011	-22.584
2.	Pemutakhiran Data/Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perizinan • Penyamaan data bidang tanah oleh Kementerian ATR/UPN dengan hak atas bidang tanah tersebut terbit sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.232/Minhut-II/2011 • Pemutakhiran IGT Pelepasan Kawasan Hutan	-10.235
3.	Perubahan Tata Ruang Kehutanan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	-21.733
4.	Laporan Survei Hutan Alam Primer Hasil pelaksanaan survei hutan alam primer	-37.077
PENAMBAHAN		+30.961
1.	Pemutakhiran Data Perizinan Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu pengurangan areal kerja setelah perpamangan yang merupakan hutan alam primer dan/atau lahan gambut.	+29.023
2.	Perubahan Tata Ruang Kehutanan Pemutakhiran Data Kawasan Hutan yaitu perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.	+1.938
JUMLAH		-60.668

Peta cetak PIPPIB sebanyak 291 NLP seluruh Indonesia dijadikan sebuah album PIPPIB. Pada tahun 2023 telah dihasilkan 2 (dua) album PIPPIB yaitu album PIPPIB Tahun 2023 Periode I dan album PIPPIB Tahun 2023 Periode II.

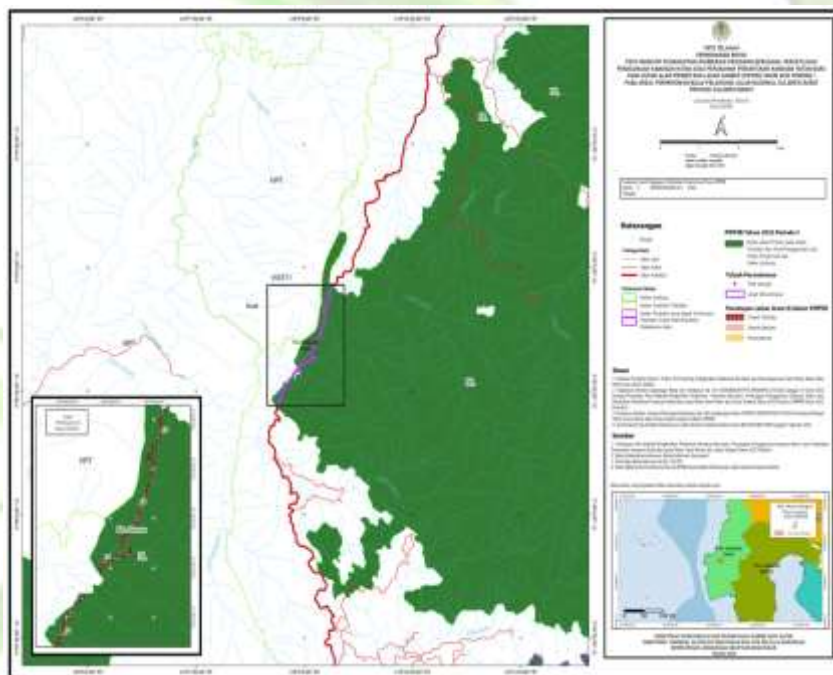


*Gambar 28. Album PIPPIB
Tahun 2023*

2. Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB ini adalah untuk memproses permohonan revisi areal indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang datanya digunakan untuk pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Penelaahan surat - surat permohonan dengan PIPPIB dilaksanakan selama periode tahun anggaran 2023 di Direktorat IPSDH, Ditjen PKTL. Penelaahan surat - surat ini terdiri dari penelaahan terhadap Peta Penutupan Lahan; Peta Kawasan Hutan; terhadap Peta PIPPIB; Peta Pelepasan Kawasan Hutan; Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan; Peta Bidang Tanah; Peta Lahan Gambut; Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan serta data peta lainnya yang tersedia dalam simpul jaringan KLHK. Hasil telaahan tersebut dituangkan dalam bentuk Peta hasil telaahan sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran informasi pada areal yang dimohon. Adapun peta yang disajikan dibuat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/Setdit/Kum.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup Kehutanan.



Gambar 29. Contoh Peta Hasil Telaahan Permohonan terhadap Peta PIPPIB

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terkait permohonan klarifikasi terhadap Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) selama tahun 2023 tercatat permohonan diterima sebanyak 764 berkas permohonan. Permohonan yang masuk ke Direktorat IPSDH berasal dari permohonan perseorangan, instansi/dinas, maupun perusahaan swasta.

Tabel 29. Jumlah Permohonan Klarifikasi PIPPIB Tahun 2023

Jenis Permohonan	Jumlah
Perseorangan	597
Instansi	102
Swasta	65
Total	764

Surat masuk selama tahun 2023 terdiri atas penyampaian laporan hasil survei hutan alam primer dan permohonan klarifikasi PIPPIB. Selama tahun 2023 telah dikeluarkan surat tanggapan oleh Direktorat IPSDH terhadap revisi PIPPIB sejumlah 764. Berdasarkan total surat yang masuk ke Direktorat IPSDH diantaranya merupakan penyampaian Laporan Hasil Survei Hutan Alam Primer yaitu sebanyak 62 laporan.

3.3.4 IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Tabel 30. Realisasi Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan informasi geospasial tematik LHK	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan	1 Layanan	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK					

Tabel 31. Progres Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	DIPA TAHUN 2023		REALISASI		
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	KETERANGAN
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Layanan informasi geospasial tematik LHK	1	layanan	1	layanan	

Kebutuhan data geospasial (DG) dan informasi geospasial (IG) semakin meningkat dan harus tersedia secara cepat dalam rangka mendukung pengurusan hutan, pengelolaan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan. Ketersediaan DG dan IG menjadi tanggung jawab Pemerintah. Untuk memudahkan pertukaran dan penyebarluasan data dan informasi geospasial antar instansi pemerintah maupun antar instansi dengan masyarakat dibentuk Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014. JIGN merupakan satu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. JIGN menjadi sarana pertukaran dan penyebarluasan data spasial yang diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Sesuai mandat Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK yang merupakan turunan PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dan

penyempurnaan Permenlhk Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK, dan sejalan dengan Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, Direktorat IPSDH ditetapkan sebagai Walidata Geospasial KLHK yang melaksanakan penyelenggaraan IGT KLHK khususnya bagian penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IGT lingkup KLHK yang diproduksi oleh 34 unit kerja setingkat eselon II sebagai Produsen Data Geospasial (DG). Secara keseluruhan penyelenggaraan IGT berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta penggunaan.

Sampai dengan Desember 2023, jumlah IGT lingkup KLHK yang tersedia di dalam basis data geospasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK adalah sebanyak 97 IGT. Perkembangan Produsen DG dan IGT lingkup KLHK 3 (tiga) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32. Perkembangan Produsen DG dan IGT lingkup KLHK

Ditjen / Badan	2021		2022		2023	
	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	27	5	35	5	35
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	12	5	12	5	12
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH)	5	13	5	14	5	14
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	4	7	4	4	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	5	5	5	10	5	11
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	3	2	2	2	2	2
Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSI LHK)	2	2	2	2	2	2

Ditjen / Badan	2021		2022		2023	
	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	6	2	6	2	7
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	3	6	3	6	3	6
Penegakan Hukum LHK	-	-	1	2	1	2
Jumlah	34	80	34	93	34	97

Nama Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 33. Daftar Nama Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
1.	Direktorat IPSDH (9 IGT)	1. Penutupan Lahan KH 2022 (Maret 2023) 2. Penutupan Hutan 2022 (Maret 2023) 3. Potensi Hutan (Jul 2020) 4. NSDH Penutupan Lahan (2022, Proses QA) 5. NSDH Kawasan Hutan (2022, Proses QA) 6. PIPPIB Periode I 2023 (Maret 2023) 7. Deforestasi 2021 – 2022 (Mei 2023) 8. Reforestasi 2021 – 2022 (Mei 2023) 9. Sebaran Klaster IHN (Mei 2020)
2.	Direktorat RPKHPWPH (12 IGT)	10. RKTN 2011-2030 (Sep 2019) 11. KPHP dan KPHL (Juli 2023) 12. KPHK (Sep 2022) 13. KHDTK (Okt 2022) 14. PIAPS Rev VIII (Februari 2023) 15. PPKH OP/NT (Agustus 2023) 16. PPKH Eksplorasi (Agustus 2023) 17. KHDPK (Des 2022) 18. WPH PERUM Kehutanan Negara (Des 2022) 19. KHKP 20. Persetujuan Kerjasama PKH (Agustus 2023) 21. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH (Agustus 2023)

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
3.	Direktorat PPKH (5 IGT)	22. Kawasan Hutan (April 2023) 23. Penetapan KH (April 2023) 24. Pelepasan KH (April 2023) 25. Indikatif PPTPKH (Feb 2023) 26. Rekalkulasi Batas KH (Okt 2020)
4.	Direktorat PDLKWS (7 IGT)	27. Ekoregion Darat (2016) 28. Ekoregion Laut (Agst 2018) 29. Karakteristik Bentang Alam (Juli 2022) 30. Karakteristik Vegetasi Alami (Juli 2022) 31. DDDTLH (Feb 2023) 32. Jasa Lingkungan Hidup terkait Air 33. Indeks Jasa Lingkungan (2022)
5.	Direktorat PDLUK (3 IGT)	34. AMDAL (Juni 2022) 35. Addendum Andal (Juni 2022) 36. UKL-UPL (Juni 2022)
6.	Direktorat Perencanaan KK (3 IGT)	37. Profil Kawasan Konservasi (Des 2021, Proses QA) 38. Zonasi Taman Nasional (Jan 2022) 39. Blok Kawasan Konservasi (Jan 2019)
7.	Direktorat Pengelolaan KK (2 IGT)	40. Daerah Penyangga (Juni 2021) 41. Kemitraan Konservasi (Des 2021)
8.	Direktorat KKHSG (3 IGT)	42. Sebaran Satwa Dilindungi (2020) 43. Perjumpaan Tumbuhan Alam pd. Kawasan Konservasi (Sept 2020) 44. Konflik Satwa & Manusia (Sept 2020)
9.	Direktorat BPPE (3 IGT)	45. Kawasan Ekosistem Esensial (2022, Proses QA) 46. Indikasi Kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar KSA/KPA/TB) (2022, Proses QA) 47. Capaian Pemulihan Ekosistem (Juni 2021)
10.	Direktorat PJLKK (8 IGT)	48. Jasling Karbon di Kawasan Konservasi (Sept 2020) 49. Potensi Jasling Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 50. Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 51. Pemanfaatan Jasling Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi 52. Potensi Panas Bumi 53. Pemanfaatan Jasling Panas Bumi 54. Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi 55. PBP Sarana Jasling Wisata Alam di Kawasan

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
----	-------------	----------

Konservasi

11. Direktorat PPPDAS (5 IGT)	56. Lahan Kritis (Des 2022) 57. DAS (2018) 58. Rawan Limpasan (2015) 59. Rawan Erosi (2018) 60. Klasifikasi DAS (Feb 2022)
12. Direktorat KTA (2 IGT)	61. Bangunan KTA (September 2022) 62. Rehabilitasi DAS (Proses QA)
13. Direktorat PTH (3 IGT)	63. Zona Benih Tanaman Hutan (2014) 64. Persebaran Persemaian Permanen (Juli 2020) 65. Persebaran Sumber Benih TH (Juli 2020)
14. Direktorat RH (1 IGT)	66. RHL (2019)
15. Direktorat RPDM (3 IGT)	67. DTA Danau (Okt 2020) 68. Mangrove (2022, Proses QA) 69. Mata Air (2019)
16. Direktorat BRPH (2 IGT)	70. Tata Hutan KPH (KPHP & KPHL) (Jul 2021) (Tersedia Sebagian) 71. Peta Arahan PHPBPH (Jun 2022, Proses QA)
17. Direktorat BUPH (1 IGT)	72. PBPH (IUPHHK HA/HT/RE/Jasling) (Agustus 2023)
18. Direktorat PUPH (2 IGT)	73. RKUPH (Agustus 2023, Proses QA) 74. Tata Batas Areal Kerja PBPH (Agustus 2023, Proses QA)
19. Direktorat BPPH (1 IGT)	75. BPPHH (Agustus, 2023)
20. Direktorat PKEG (3 IGT)	76. Fungsi Ekosistem Gambut (November 2022) 77. KHG (Nov 2022) 78. Status Kerusakan Ekosistem Gambut (Juli 2022)
21. Direktorat PPKPL (2 IGT)	79. Indeks Kualitas Air Laut (Juni 2020) 80. Pemantauan Sampah Laut (Sept 2021)
22. Direktorat PKL (1 IGT)	81. Indikatif Kerusakan Lahan (2018)
23. Direktorat PPA (1 IGT)	82. Status Mutu Air (Des 2021, Proses QA)
24. Direktorat PPU (2 IGT)	83. Beban Emisi (Nov 2022, Proses QA) 84. Indeks Kualitas Udara (Okt 2022)
25. Direktorat PS (1 IGT)	85. Sebaran Pengelolaan Sampah (Sept 2021)

NO	PRODUSEN DG	NAMA IGT
26.	Direktorat PB3 (1 IGT)	86. Pemantauan Merkuri (Juni 2020)
27.	Direktorat PKHL (3 IGT)	87. Sebaran Hotspot (Mei 2023) 88. Areal Karhutla (September 2023) 89. Rawan Karhutla (Desember 2022)
28.	Direktorat API (2 IGT)	90. Kerentanan Perubahan Iklim (2018) 91. Lokasi Proklamasi (Des 2022, Proses QA)
29.	Dit. IGRKMPV (2 IGT)	92. Wilayah Pengukuran Kinerja REDD (Nov 2020) 93. Cadangan Karbon
30.	Dit. PKPS (5 IGT)	94. Persetujuan Pengelolaan HD (Juni 2023) 95. Persetujuan Pengelolaan HKm (Juni 2023) 96. Persetujuan Pengelolaan HTR (Juni 2023) 97. Persetujuan Kemitraan Kehutanan (Juni 2023) 98. IPHPS (Juni 2023)
31.	Dit. PKTHA (2 IGT)	99. Penetapan Status Hutan Adat (September 2023) 100. Penetapan Status Hutan Hak (September 2023)
32.	Set BSI LHK (1 IGT)	101. Hutan Penelitian (Okt 2020)
33.	PSIPHB (1 IGT)	102. PUP (Okt 2020)
34.	Dit. PSLH (2 IGT)	103. Sebaran Penyelesaian Sengketa LH Melalui Pengadilan (2023, Proses QA) 104. Sebaran Penyelesaian Sengketa LH di Luar Pengadilan (2023, Proses QA)
35.	Lainnya (3 IGT)	105. Indeks Prioritas Lokasi (2022) 106. Tipologi Kelembagaan (2022) 107. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 (2022)

Keterangan

 : Data Tersedia (97)

 : Data Belum Tersedia (usulan IGT baru)

 : Data Tersedia & IGT KSP (Perpres 9/2016: 9)

 : Data Tersedia & IGT KSP (Perpres 23/2021:16)

Dalam rangka peningkatan layanan informasi geospasial lingkup KLHK, Direktorat IPSDH selaku walidata geospasial telah melakukan kegiatan penjaminan kualitas IGT yang diproduksi oleh Produsen DG sebelum IGT tersebut disebarluaskan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penjaminan kualitas IGT yaitu konsistensi format dan domain dengan acuan Kamus Data Geospasial LHK, konsistensi topologi dengan acuan aturan topologi dan kesesuaian batas garis pantai dengan acuan Informasi Geospasial Dasar (IGD), serta kelengkapan metadata dengan acuan standar metadata.

Adapun penjaminan kualitas telah dilakukan selama tahun 2022 terhadap 43 IGT yaitu sebanyak 79 kali. Sementara itu, penjaminan kualitas IGT yang dilakukan sejak Januari-November 2023 terhadap 34 IGT yaitu sebanyak 68 Kali (menyesuaikan dengan frekuensi priode pemutakhiran IGT nya).

Dalam rangka peningkatan tata kelola penyelenggaraan IGT lingkup KLHK yang berkualitas sesuai standar dan memenuhi kebutuhan pengguna, juga telah dilakukan beberapa kali kegiatan rapat koordinasi dengan Produsen DG. Maksud dilaksanakan kegiatan rapat tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara walidata geospasial dengan produsen DG, serta menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu peta dan satu data indonesia. Selain itu telah dilakukan penyusunan SOP Penjaminan Kualitas IGT LHK dan Standar Pengolahan IGT. Dokumen SK pengolahan IGT meliputi Kamus Data Geospasial LHK, Simbologi, dan Rule Topologi yang disusun bersama-sama oleh Walidata Geospasial (Direktorat IPSDH) dan Produsen Data Geospasial.

Tabel 34. Penjaminan Kualitas IGT

NO	BULAN	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)	PERIODE PEMUTAKHIRAN
1	Januari	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	Desember 2022
2		Areal Kebakaran Hutan dan Lahan	Desember 2022
3		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Non Tambang	Desember 2022
4		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	Desember 2022
5		Lahan Kritis	Desember 2022
6		Areal Kerja Perhutani	Desember 2022
7		Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)	Desember 2022
8	Februari	Rehabilitasi DAS	Desember 2022

NO	BULAN	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)	PERIODE PEMUTAKHIRAN
9		Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	2022
10		Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	2022
11		Status Mutu Air	Desember 2022
12		Penutupan Lahan Kawasan Hutan	Maret 2023
13	Maret	Lokasi Proklamasi	Desember 2022
14		Penutupan Lahan Kawasan Hutan	Maret 2023
15		Lahan Kritis	Desember 2022
16		Kawasan Hutan	Desember 2022
17	April	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	Februari 2023
18	Mei	Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VIII	Januari 2023
19		PIPIB Periode 1 Tahun 2023	Periode I 2023
20		Deforestasi	Maret 2023
21		Reforestasi	Maret 2023
22		Penutupan Hutan	Maret 2023
23		Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan	April 2023
24		Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	April 2023
25		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Non Tambang	April 2023
26		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	April 2023
27		Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan	April 2023
28	Juni	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	April 2023
29		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Non Tambang	April 2023
30		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	April 2023
31		NSDH Kawasan Hutan	Juni 2023
32		NSDH Penutupan Lahan	Juni 2023
33		Penetapan kawasan hutan	April 2023
34		Kawasan Hutan	April 2023
35		Pelepasan Kawasan Hutan	April 2023
36	Juli	Deforestasi	Mei 2023
37		Reforestasi	Mei 2023
38		Penutupan Hutan	Mei 2023
39		Sebaran Hotspot	Mei 2023

NO	BULAN	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)	PERIODE PEMUTAKHIRAN
40		Areal Kebakaran Hutan	Juni 2023
41		Mangrove	Desember 2022
42		Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD)	Juni 2023
43		Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)	Juni 2023
44		Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	Juni 2023
45		Persetujuan Kemitraan Kehutanan	Juni 2023
46		IPHP	Juni 2023
47		Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL)	Juni 2023
48	Agustus	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Agustus 2023
49	September	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH)	Agustus 2023
50		Tata Batas Areal Kerja PBPH	Agustus 2023
51		Areal Kebakaran Hutan dan Lahan	Agustus 2023
52		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Non Tambang	Agustus 2023
53		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	Agustus 2023
54		Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan	Agustus 2023
55		Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	Agustus 2023
56		Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)	Agustus 2023
57		Penetapan Status Hutan Adat	September 2023
58		Hutan Hak	September 2023
59	Oktober	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	Oktober 2023
60		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Non Tambang	Agustus 2023
61		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	Agustus 2023
62		Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan	Agustus 2023
63		Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	Agustus 2023
64	November	Areal Kebakaran Hutan dan Lahan	Oktober 2023
65		Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	2023
66		PIPPB Periode II 2023	Periode II 2023
67	Desember	Kawasan Hutan	September 2023
68		NSDH Kawasan Hutan	2023

NO	BULAN	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)	PERIODE PEMUTAKHIRAN
69		NSDH Penutupan Lahan	2023
70		Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD)	Desember 2023
71		Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)	Desember 2023
72		Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	Desember 2023
73		Persetujuan Kemitraan Kehutanan	Desember 2023
74		IPHPS	Desember 2023

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK telah memberikan pelayanan melalui surat sebanyak 291 permohonan sampai Desember 2023, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 331 pelayanan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten maupun kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi untuk keperluan penelitian.

Pelayanan data dan informasi dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan sejak tahun 2020 selain Walidata Geospasial dilakukan juga oleh BPKHTL selaku unit yang diberi kewenangan untuk membantu Ditrektorat IPSDH memenuhi permohonan data di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Rekapitulasi pelayanan data pada Walidata Geospasial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35. Rekapitulasi Pelayanan Data

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN
1	Januari	17
2	Februari	24
3	Maret	30
4	April	27
5	Mei	18
6	Juni	22
7	Juli	25

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN
8	Agustus	25
9	September	30
10	Oktober	22
11	November	29
12	Desember	21
TOTAL PELAYANAN		291

Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status rerkompilasi seluruhnya (25 IGT), dan setelah melalui tahapan integrasi (proses koreksi dan verifikasi) terdapat 23 IGT yang terintegrasi dan 2 IGT yang masih dalam proses integrasi dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLISH	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
1	Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2022 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	- Data 2022 sudah publish - Data 2023 proses publish	B12 2022: 2.500.000 Ha B12 2023: 10.000.000 Ha B12 2024: 24.000.000 Ha	Cakupan wilayah: Nasional (97.118.757,05 Ha)
2	Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000 / Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 200.000 Ha B12 2023: 150.000 Ha B12 2024: 150.000 Ha	- Cakupan wilayah: 18 provinsi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusra (155.261,44 Ha) - Terdapat pemutakhiran di tahun 2023 namun masih dalam proses verifikasi-perbaikan (169.107,95 Ha) – Verifikasi diserahkan 30 Agustus 2023
3	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B09 2022: 1 SK B09 2023: 1 SK B09 2024: 1 SK	- Cakupan wilayah: 22 provinsi di seluruh region (kecuali Maluku) (82 SK) - Terdapat pemutakhiran data sejak 2022, namun masih dalam proses verifikasi-perbaikan (90 SK) – Verifikasi telah diserahkan 28 Juli 2023

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLISH	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
4	Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	- Sudah Publish - Data September 2023 proses publish	B09 2022: 15 SK B09 2023: 15 SK B09 2024: 15 SK	Cakupan wilayah: 17 provinsi di seluruh region - Tahun 2022: 105 SK - Tahun 2023: 123 SK
5	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 34 SK perkembangan pengukuhan / SK Kawasan Hutan B12 2023: 34 SK perkembangan pengukuhan / SK Kawasan Hutan B12 2024: 34 SK perkembangan pengukuhan / SK Kawasan Hutan	Cakupan wilayah: Nasional (34 SK)
6	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan 2022 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 26 KHG B12 2023: 17 KHG B12 2024: 10 KHG	Cakupan wilayah: 12 provinsi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua (108 KHG)

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLISH	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
7	Peta DAS skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS)	Pemutakhiran IGT Potensi	- Data terintegrasi tahun 2022 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2024: 1 Peta DAS seluruh Indonesia	Cakupan wilayah: Nasional
8	Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA skala 1:50.000 / Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	- Data 2021 sudah publish - Data 2023 proses publish	B12 2022: 2 SK B08 2023: 1 SK B12 2023: 2 SK B08 2024: 1 SK B12 2024: 2 SK	Cakupan wilayah: Nasional (SK 903 Tahun 2023)
9	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Pemutakhiran IGT Potensi	- Data terintegrasi tahun 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 1 Notdin dan lampiran Peta NSDH B12 2023: 1 Notdin dan lampiran Peta NSDH	- Cakupan wilayah: Nasional - Hanya layer Neraca Sumber Daya Hutan untuk Penutupan Lahan

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLIKASI	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
10	Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan skala 1:50.000 / Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan tahun 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 100 SK B12 2023: 100 SK B12 2024: 100 SK	- Cakupan wilayah: Nasional (1.206 SK PPKH, 66 SK Eksplorasi) - Terdapat pemutakhiran data pada September 2023 namun masih dalam proses penyusunan BA Integrasi (1.208 SK PPKH, 58 SK Eksplorasi)
11	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021, 2022, dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 2 SK B08 2023: 1 SK B12 2023: 2 SK B08 2024: 1 SK B12 2024: 2 SK	Cakupan wilayah: Nasional (SK 3554 Tahun 2023)
12	Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan Skala 1:50.000 / Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	Luas (Ha): B12 2022: 200.000 B09 2023: 150.000 B09 2024: 150.000	- Cakupan wilayah: 27 provinsi di seluruh region (kecuali Jawa) (708.078,04 Ha) - Terdapat pemutakhiran data pada Agustus 2023, namun masih dalam proses verifikasi-perbaikan (868.718,20 Ha) – Hasil verifikasi akan diserahkan BIG pada 1 Desember 2023

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLIKASI	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
13	Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa Skala 1:50.000 / Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 dan tahun 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	Luas (Ha): B12 2022: 200.000 B09 2023: 150.000 B09 2024: 150.000	- Cakupan wilayah: 26 provinsi di seluruh region (kecuali Jawa) (1.216 SK) - Terdapat pemutakhiran data pada tahun Agustus 2023 namun masih dalam proses verifikasi-perbaikan (1.345 SK) - Hasil verifikasi akan diserahkan BIG pada 1 Desember 2023
14	Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	Luas (Ha): B12 2022: 0 B09 2023: 0 B09 2024: 0	- Cakupan wilayah: 4 provinsi di Jawa (64 SK dan 31 masih proses) - Terdapat pemutakhiran data pada tahun 2023 namun masih dalam proses verifikasi-perbaikan (90 SK dan 1 masih proses) - Hasil verifikasi akan diserahkan BIG pada 1 Desember 2023
15	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2021, Maret 2022, dan Desember 2022 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 12 FEG B12 2023: 17 FEG B12 2024: 10 FEG	Cakupan wilayah: 12 provinsi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua (108 FEG)

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS INTEGRASI	STATUS PUBLISH	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
16	Peta Rawan Erosi skala 1:50.000	Perwujudan IGT Potensi	- Data terintegrasi tahun 2021 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 0 Peta B12 2023: 0 Peta B12 2024: 0 Peta	Cakupan wilayah: Nasional
17	Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000	Perwujudan IGT Potensi	- Data terintegrasi tahun 2021 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: Update data di 23 provinsi B12 2023: Update data di 23 provinsi B12 2024: Update data di 23 provinsi	Cakupan wilayah: 16 provinsi di seluruh region
18	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	Perwujudan IGT Potensi	- Data terintegrasi tahun 2022 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 1 Peta B12 2023: 1 Peta B12 2024: 1 Peta	Cakupan wilayah: Nasional
19	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Data terintegrasi tahun 2022 dan 2023 - Data telah diserahkan ke Satgas 3	Sudah Publish	B12 2022: 3 SK B12 2023: 3 SK B12 2024: 3 SK	Cakupan wilayah: 33 provinsi di seluruh region 2022: 1.159 SK, 3 proses langsung ke BPN 2023: 1.200 SK, 3 proses langsung ke BPN

2 IGT dengan Status masih Proses Verifikasi (Perbaikan)

NO	IGT	STATUS IGT	STATUS VERIFIKASI	UPLOAD DATA	UPLOAD HASIL VERIFIKASI	TARGET KUANTITATIF	KETERANGAN
1	Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHKHA/HT/RE) skala 1:50.000 / Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000	Perwujudan IGT Status	- Konsistensi topologi - Konsistensi atribut - Perbaikan metadata	06/09/2023	13/09/2023	B12 2022: 3 SK B12 2023: 3 SK B12 2024: 3 SK	Cakupan wilayah: 135 SK di 13 provinsi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua
2	Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000 / Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Pemutakhiran IGT Status	- Tidak sesuai IGD - Konsistensi topologi - Konsistensi atribut - Perbaikan metadata	06/09/2023	13/09/2023	Pemutakhiran B12 2022: 12 unit PBPH B12 2023: 10 unit PBPH B12 2024: 11 unit PBPH	Cakupan wilayah: 567 SK di 27 provinsi di seluruh region (kecuali Jawa)

Menindaklanjuti hal dimaksud telah disampaikan surat Direktur IPSDH kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG selaku Ketua Satuan Tugas 1

Sekretariat KSP mengenai capaian target renaksi 25 IGT yang telah terkompilasi dengan hasil kompilasi 23 IGT telah terintegrasi dan 2 IGT masih proses integrasi yakni IGT Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHKHA/HT/RE) skala 1:50.000 / Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000 dan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000 / Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000 dan penyampaian 8 IGT terget Renaksi B09 Tahun 2023 yang juga ditembuskan ke Produsen DG yang bertanggungjawab terhadap IGT dimaksud. Kemudian sampai dengan Desember 2023 juga telah disampaikan surat Direktur IPSDH kepada Produsen DG yang bertanggungjawab terhadap capaian Renaksi B12 yang terdiri dari 20 IGT untuk menyampaikan update IGT termasuk 2 IGT yang masih dalam proses Integrasi. Selain disampaikan juga usulan perubahan nomenklatur IGT Kawasan Hutan, seiring berjalannya permintaan data Kawasan Hutan yang merupakan IGT tatakan yang banyak digunakan dalam berbagai sektor dalam perencanaan pembangunan baik Daerah, Pusat maupun Nasional untuk menghindari kesalahpahaman pengguna di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah melalui Portal Kebijakan Satu Peta (KSP) telah disampaikan surat Plt. Direktur Jenderal PKTL kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Perekonomian selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Tindaklanjut terkait dengan perubahan nomenklatur IGT Peta Penunjukan Kawasan Hutan Skala 1 : 250.000 menjadi IGT Kawasan Hutan Skala 1 : 250.000 dimana IGT dimaksud sudah memuat Penunjukan dan Penetapan Kawasan Hutan serta Proses Pengukuhan Kawasan Hutan.

3.3.5 IKK Data dan Informasi Deforestasi

Tabel 36. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Deforestasi	Pegolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Tabel 37. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	DIPA TAHUN 2023		REALISASI		
				TARGET	SATUAN	REALISASI	SATUAN	KETERANGAN
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Deforestasi	1	layanan	1	layanan	Telah disusun Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2020-2021

Gambar 30. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2021-2022

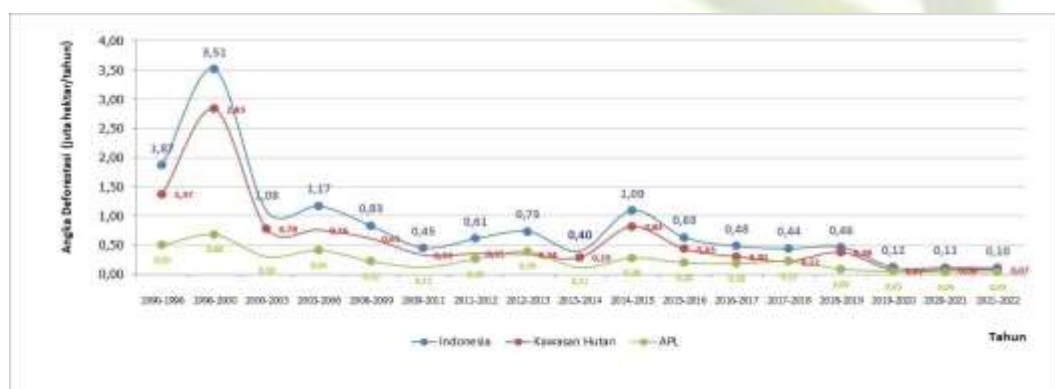


Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2021 dan 2022 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2021- 2022. Peta tersebut menyajikan sebaran perubahan tutupan hutan meliputi pengurangan maupun penambahan hutan mencakup tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman. Pengurangan hutan menampilkan kejadian Deforestasi Bruto sementara penambahan hutan menampilkan kejadian Reforestasi.

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatannya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada

periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020-2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2020-2021 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia netto tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %. Hutan tanaman pada periode ini cenderung mengalami reforestasi yang lebih besar dari pada deforestasi bruto. Deforestasi bruto pada hutan primer mengalami kenaikan sedangkan pada hutan sekunder juga mengalami penurunan dari periode 2020-2021. Kenaikan deforestasi pada hutan primer sebesar 7,7 ribu ha menjadi 11,3 ribu ha. Penurunan pada hutan sekunder sebesar 129,3 ribu ha menjadi 106,4 ribu ha. Perkembangan angka deforestasi tahun 1990 hingga 2022 dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar 31. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2022



AREAL	PERKEMBANGAN DEFESTASI (JUTA HAKTAR)									
	2018-2019		2019-2020		2020-2021		2020-2021		2021-2022	
	DEFOR ESTASI BRUT O	REFORE STASI	DEF ORES TASI BRU TO	REFOR ESTASI	DEFOR ESTASI BRUT O	REFO RESTA SI	DEFOR ESTASI BRUT O	REFOR ESTASI	DEFOR ESTASI BRUT O	REFOR ESTASI
INDONESIA	0,47	0,003	0,12	0,0036	0,08	0,01	0,14	0,03	0,12	0,02
KAWASAN HUTAN	0,38	0,003	0,07	0,0003	0,02	0,00	0,10	0,02	0,09	0,01
NON KAWASAN	0,09	0,0002	0,05	0,0008	0,03	0,01	0,04	0,00	0,03	0,00

Pemerintah merencanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup segala bidang kehidupan, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Sesuai dengan lingkup Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perencanaan pembangunan

di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan, atau APL. Perencanaan pembangunan di dalam kawasan hutan difokuskan pada pemanfaatan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan perencanaan pembangunan di luar kawasan hutan difokuskan pada perhutanan sosial. Perencanaan pembangunan selain pada bidang kehutanan juga dilakukan oleh berbagai bidang lain, yang masing-masing memiliki kebutuhan pemanfaatan lahan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, adanya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimungkinkan demi tercapainya target-target pembangunan tersebut.

Segala aktivitas pembangunan tersebut dapat mempengaruhi perubahan penutupan hutan dan lahan baik yang menyebabkan pertambahan areal penutupan hutan maupun pengurangan areal penutupan hutan. Perubahan penutupan hutan selain dipengaruhi oleh aktivitas yang terencana sebagaimana di atas terdapat juga faktor yang tidak terencana, salah satunya adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perubahan tersebut berbeda setiap tahunnya yang secara periodik dapat diamati dan dimonitor dalam bentuk kecenderungan (*trend*). Pemahaman terhadap *trend* ini merupakan informasi yang sangat berguna dalam urusan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan dinamika yang terjadi di kawasan hutan. Dinamika tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan (tidak berhutan), atau bahkan sebaliknya. Untuk menjaga agar dinamika perubahan tersebut dapat tetap terkendali, maka kebijakan integratif yang dipayungi dengan *Indonesia FOLU NetSink 2030* menjadi bernilai strategis. Hal ini karena kebijakan tersebut akan menjamin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten menerapkan program-program yang saling mendukung, termasuk program untuk merehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam kawasan hutan.

Apabila kita memperhatikan besaran perhitungan deforestasi selama beberapa periode terakhir memperlihatkan angka yang relatif menurun. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya *corrective action* yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Tabel 38. Deforestasi di Dalam Kawasan Hutan Konservasi (HK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi						Total
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	234,5	2,7	114,5	1,3	-	-	349,1
2	Sumatera Utara	112,6	1,3	164,3	1,9	-	-	276,9
3	Riau	11,4	0,1	1.462,1	16,5	-	-	1.473,5
4	Sumatera Barat	958,0	10,8	757,5	8,6	-	-	1.715,5
5	Jambi	1.520,9	17,2	1.615,7	18,3	-	-	3.136,6
6	Sumatera Selatan	35,2	0,4	101,1	1,1	-	-	136,3
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	12,6	0,1	-	-	12,6
8	Bengkulu	241,7	2,7	272,4	3,1	-	-	514,1
9	Lampung	136,7	1,5	28,7	0,3	-	-	165,4
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
	SUMATERA	3.251,1	36,8	4.529,0	51,2	-	-	7.780,1
			-		-		-	
11	Banten	-	-	-	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	6,2	0,1	-	-	6,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	12,9	0,1	-	-	12,9
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
	JAWA	-	-	19,2	0,2	-	-	19,2
			-		-		-	
17	Kalimantan Barat	16,0	0,2	68,4	0,8	-	-	84,4
18	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
19	Kalimantan Tengah	-	-	7,2	0,1	-	-	7,2
20	Kalimantan Timur	-	-	59,2	0,7	-	-	59,2
21	Kalimantan Utara	6,6	0,1	1,6	0,0	-	-	8,1
	KALIMANTAN	22,5	0,3	136,4	1,5	-	-	158,9
			-		-		-	
22	Sulawesi Utara	11,2	0,1	2,7	0,0	-	-	13,9
23	Gorontalo	13,8	0,2	4,9	0,1	-	-	18,7
24	Sulawesi Tengah	1,4	0,0	94,2	1,1	-	-	95,6
25	Sulawesi Tenggara	-	-	48,4	0,5	-	-	48,4
26	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	12,1	0,1	4,8	0,1	-	-	16,9
	SULAWESI	38,6	0,4	155,0	1,8	-	-	193,5
			-		-		-	
28	Bali	-	-	-	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	354,8	4,0	-	-	354,8
30	Nusa Tenggara Timur	37,2	0,4	23,8	0,3	-	-	61,1
	BALI NUSA TENGGARA	37,2	0,4	378,7	4,3	-	-	415,9
			-		-		-	
31	Maluku Utara	14,8	0,2	20,2	0,2	-	-	35,0
32	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
	MALUKU	14,8	0,2	20,2	0,2	-	-	35,0
			-		-		-	
33	Papua	119,9	1,4	67,0	0,8	-	-	186,8
34	Papua Barat	30,3	0,3	20,3	0,2	-	-	50,6
	PAPUA	150,2	1,7	87,3	1,0	-	-	237,5
	INDONESIA	3.514,5	39,8	5.325,6	60,2	-	-	8.840,0

Tabel 39. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	440,6	668,7	-	1.109,4
2	Sumatera Utara	144,2	1.284,7	-	1.428,9
3	Riau	10,5	1.126,9	-	1.137,5
4	Sumatera Barat	974,1	1.249,4	-	2.223,5
5	Jambi	119,6	33,0	-	152,6
6	Sumatera Selatan	113,0	1.681,1	-	1.794,1
7	Kepulauan Bangka Belitung	12,9	327,6	-	340,5
8	Bengkulu	352,4	614,3	-	966,6
9	Lampung	14,9	341,9	-	356,8
10	Kepulauan Riau	-	13,5	-	13,5
	SUMATERA	2.182,3	7.341,1	-	9.523,4
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	74,2	-	74,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	19,4	-	19,4
	JAWA	-	93,6	-	93,6
17	Kalimantan Barat	99,0	702,7	-	801,8
18	Kalimantan Selatan	3,0	288,3	-	291,2
19	Kalimantan Tengah	-	95,5	-	95,5
20	Kalimantan Timur	22,0	148,3	-	170,3
21	Kalimantan Utara	-	28,0	-	28,0
	KALIMANTAN	124,0	1.262,8	-	1.386,8
22	Sulawesi Utara	11,2	4,8	-	16,1
23	Gorontalo	-	24,2	-	24,2
24	Sulawesi Tengah	66,3	288,1	-	354,4
25	Sulawesi Tenggara	34,0	1.744,7	-	1.778,7
26	Sulawesi Barat	2,5	60,4	-	62,9
27	Sulawesi Selatan	80,5	378,0	-	458,5
	SULAWESI	194,5	2.500,2	-	2.694,7
28	Bali	-	51,2	-	51,2
29	Nusa Tenggara Barat	67,5	1.520,0	6,4	1.593,8
30	Nusa Tenggara Timur	197,3	716,1	-	913,4
	BALI NUSA TENGGARA	264,7	2.287,3	6,4	2.558,4
31	Maluku Utara	39,7	127,3	-	167,0
32	Maluku	-	174,1	-	174,1
	MALUKU	39,7	301,4	-	341,2
33	Papua	23,2	44,0	-	67,1
34	Papua Barat	-	38,8	-	38,8

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
	PAPUA	23,2	82,8	-	106,0
	INDONESIA	2.828,5	13.869,2	6,4	16.704,0

Tabel 40. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) per Provinsi (Ha)
Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	67,2	285,3	-	352,5
2	Sumatera Utara	3,9	752,5	-	756,3
3	Riau	276,6	2.187,6	-58,3	2.405,9
4	Sumatera Barat	16,5	320,8	-	337,3
5	Jambi	80,7	750,9	-	831,6
6	Sumatera Selatan	-	230,5	-	230,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
8	Bengkulu	31,1	2.140,8	-	2.171,9
9	Lampung	7,9	27,5	-	35,4
10	Kepulauan Riau	-	28,1	-	28,1
	SUMATERA	483,9	6.724,0	-58,3	7.149,5
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	5,2	23,9	29,0
14	Jawa Tengah	-	92,1	3,2	95,3
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	97,2	27,1	124,3
		0,7	2,1		
17	Kalimantan Barat	668,6	2.119,8	-120,1	2.668,3
18	Kalimantan Selatan	-	159,9	-	159,9
19	Kalimantan Tengah	-	1.196,3	-	1.196,3
20	Kalimantan Timur	16,1	888,5	-	904,6
21	Kalimantan Utara	103,8	349,0	-	452,9
	KALIMANTAN	788,5	4.713,5	-120,1	5.381,9
22	Sulawesi Utara	23,0	219,6	-	242,6
23	Gorontalo	18,1	178,6	-	196,7
24	Sulawesi Tengah	487,1	922,7	5,9	1.415,8
25	Sulawesi Tenggara	33,1	644,1	-	677,2
26	Sulawesi Barat	-	123,2	-	123,2
27	Sulawesi Selatan	38,1	249,2	-	287,3
	SULAWESI	599,4	2.337,4	5,9	2.942,7
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	23,0	1.542,0	8,6	1.573,5
30	Nusa Tenggara Timur	55,3	189,1	-	244,4

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
	BALI NUSA TENGGARA	78,3	1.731,0	8,6	1.817,9
31	Maluku Utara	56,6	283,8	-	340,4
32	Maluku	-	98,4	-	98,4
	MALUKU	56,6	382,2	-	438,8
33	Papua	691,4	515,9	-	1.207,3
34	Papua Barat	5,8	28,8	-	34,6
	PAPUA	697,2	544,7	-	1.241,9
	INDONESIA	2.703,9	16.530,1	-136,9	19.097,0

Tabel 41. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) per Provinsi (Ha)
Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	234,9	743,3	20,5	998,6
2	Sumatera Utara	0,9	685,2	-	686,1
3	Riau	-	3.424,5	-1.074,6	2.349,9
4	Sumatera Barat	12,2	374,2	-	386,3
5	Jambi	153,6	820,2	-	973,9
6	Sumatera Selatan	-	44,1	-2.341,6	-2.297,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	34,0	1.296,7	-	1.330,7
8	Bengkulu	-	770,7	-	770,7
9	Lampung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	30,7	-	30,7
	SUMATERA	435,5	8.189,6	-3.395,7	5.229,4
11	Banten	-	-	3,5	3,5
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	73,3
14	Jawa Tengah	-	24,4	9,8	34,2
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	24,4	86,6	110,9
17	Kalimantan Barat	8,7	2.957,0	-1.530,1	1.435,7
18	Kalimantan Selatan	-	351,5	-183,6	167,8
19	Kalimantan Tengah	-	11.172,6	-4.800,5	6.372,1
20	Kalimantan Timur	-	4.088,9	-1.523,5	2.565,5
21	Kalimantan Utara	5,4	325,3	-20,6	310,2
	KALIMANTAN	14,2	18.895,3	-8.058,2	10.851,3
22	Sulawesi Utara	11,6	2,9	-	14,6
23	Gorontalo	-	11,2	-	11,2
24	Sulawesi Tengah	59,2	532,3	-	591,5
25	Sulawesi Tenggara	3,8	185,4	-	189,2

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
26	Sulawesi Barat	-	130,8	-	130,8
27	Sulawesi Selatan	-	78,2	-	78,2
	SULAWESI	74,7	940,8	-	1.015,5
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	8,6	1.285,8	13,9	1.308,2
30	Nusa Tenggara Timur	88,1	349,0	-	437,1
	BALI NUSA TENGGARA	96,7	1.634,8	13,9	1.745,4
31	Maluku Utara	1,1	894,9	-	896,0
32	Maluku	-	990,3	-	990,3
	MALUKU	1,1	1.885,2	-	1.886,3
33	Papua	-	1.490,4	-839,5	650,9
34	Papua Barat	12,5	65,2	-364,5	-286,8
	PAPUA	12,5	1.555,6	-1.204,0	364,1
	INDONESIA	634,7	33.125,7	-12.557,5	21.202,9

Tabel 42. Deforestasi di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	-	24,9	-	24,9
2	Sumatera Utara	-	111,3	-	111,3
3	Riau	-	530,9	-	530,9
4	Sumatera Barat	-	198,7	-	198,7
5	Jambi	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-	-
7	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-
8	Bengkulu	-	9,0	-	9,0
9	Lampung	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	19,5	-	19,5
	SUMATERA	-	894,3	0,0	894,3
11	Banten	-	-	-	-
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-
	JAWA	-	-	-	-
17	Kalimantan Barat	-	138,8	-	138,8
18	Kalimantan Selatan	-	17,5	-	17,5
19	Kalimantan Tengah	-	2.167,0	-	2.167,0
20	Kalimantan Timur	-	269,3	727,4	996,7
21	Kalimantan Utara	-	78,7	-	78,7

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
	KALIMANTAN	-	2.671,3	727,4	3.398,7
22	Sulawesi Utara	-	8,0	-	8,0
23	Gorontalo	-	3,6	-	3,6
24	Sulawesi Tengah	88,5	944,7	-	1.033,2
25	Sulawesi Tenggara	-	7,2	-	7,2
26	Sulawesi Barat	-	12,9	-	12,9
27	Sulawesi Selatan	-	-	-	-
	SULAWESI	88,5	976,3	-	1.064,8
28	Bali	-	-	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-
30	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
	BALI NUSA TENGGARA	-	-	-	-
31	Maluku Utara	-	880,5	-	880,5
32	Maluku	1,9	147,9	-	149,8
	MALUKU	1,9	1.028,4	-	1.030,3
33	Papua	282,2	528,1	-	810,4
34	Papua Barat	-	98,3	10,5	87,8
	PAPUA	282,2	626,4	10,5	898,2
	INDONESIA	372,6	6.196,8	716,9	7.286,3

Tabel 43. Deforestasi Di Luar Kawasan Hutan (Areal Penggunaan Lain / APL) per Provinsi (Ha) Tahun 2021-2022

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	Total
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
1	Aceh	265,1	2.262,1	5,4	2.532,6
2	Sumatera Utara	0,0	2.339,4	-	2.339,4
3	Riau	-	1.431,2	74,0	1.357,1
4	Sumatera Barat	54,1	902,0	-	956,1
5	Jambi	83,7	288,7	-	372,3
6	Sumatera Selatan	45,0	497,5	2,0	540,5
7	Kepulauan Bangka Belitung	2,5	528,7	-	531,3
8	Bengkulu	0,4	329,7	-	330,0
9	Lampung	-	66,1	-	66,1
10	Kepulauan Riau	-	298,1	-	298,1
	SUMATERA	450,7	8.943,5	70,6	9.323,5
11	Banten	-	31,2	3,8	27,4
12	DKI Jakarta	-	-	-	-
13	Jawa Barat	-	-	127,9	127,9
14	Jawa Tengah	-	585,1	0,0	585,1
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	50,4	-	50,4
	JAWA	-	565,9	131,7	434,3

No.	Provinsi	Angka Deforestasi			Total
		Hutan Primer	Hutan Sekunder	Hutan Tanaman	
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	
1	2	3	5	7	9
17	Kalimantan Barat	-	2.723,4	- 6,6	2.716,8
18	Kalimantan Selatan	-	98,8	- 600,3	501,5
19	Kalimantan Tengah	-	1.726,2	-	1.726,2
20	Kalimantan Timur	12,3	4.739,4	42,6	4.794,3
21	Kalimantan Utara	59,5	3.331,0	-	3.390,4
	KALIMANTAN	71,8	12.618,8	- 564,3	12.126,3
22	Sulawesi Utara	6,0	83,4	-	89,4
23	Gorontalo	-	83,2	-	83,2
24	Sulawesi Tengah	104,3	2.165,8	-	2.270,1
25	Sulawesi Tenggara	6,0	910,6	-	916,6
26	Sulawesi Barat	-	75,9	-	75,9
27	Sulawesi Selatan	-	239,3	-	239,3
	SULAWESI	116,3	3.558,3	-	3.674,6
28	Bali	-	2,0	-	2,0
29	Nusa Tenggara Barat	-	1.566,5	14,3	1.580,8
30	Nusa Tenggara Timur	223,3	2.065,4	-	2.288,8
	BALI NUSA TENGGARA	223,3	3.633,9	14,3	3.871,5
31	Maluku Utara	4,4	342,5	-	346,9
32	Maluku	-	50,5	-	50,5
	MALUKU	4,4	393,0	-	397,4
33	Papua	366,8	1.242,7	-	1.609,4
34	Papua Barat	-	334,0	-	334,0
	PAPUA	366,8	1.576,7	-	1.943,5
	INDONESIA	1.233,3	30.158,3	- 489,0	30.902,6

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.735.200.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Rupiah) dengan total realisasi anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp 6.734.318.035,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 99,99%.

Alokasi anggaran Tahun 2023 guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2023	Persen
		Rp	Rp	%
Belanja Barang	RM	2.121.400.000	2.120.617.845	99.96

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2023	Persen
		Rp	Rp	%
Belanja Modal	PN	4.098.500.000	4.098.400.190	100.00
	RM	53.600.000	53.600.000	100.00
	PN	461.700.000	461.700.000	100.00
Jumlah		6.735.200.000	6.734.318.035	99.99

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat IPSDH melakukan beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA. Dengan perubahan penambahan/pengurangan anggaran sebagai berikut:

Tabel 45. Alokasi Anggaran 2023 setelah Revisi

Uraian	ANGGARAN 2023		Penambahan / Pengurangan
	SEBELUM	SESUDAH	
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	4.200.000.000	6.735.200.000	2.535.200.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.200.000.000	4.981.500.000	1.781.500.000
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3.200.000.000	4.981.500.000	1.781.500.000
Data dan Informasi Publik[Base Line]	3.200.000.000	4.981.500.000	1.781.500.000
Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	950.000.000	950.000.000	-
Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1.500.000.000	2.350.000.000	850.000.000
Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	375.000.000	375.000.000	-
Data dan Informasi deforestasi	125.000.000	1.056.500.000	931.500.000

Uraian	ANGGARAN 2023		Penambahan / Pengurangan
	SEBELUM	SESUDAH	
Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000.000	250.000.000	-
Program Dukungan Manajemen	1.000.000.000	1.753.700.000	753.700.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.000.000.000	1.753.700.000	753.700.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000
Layanan Umum	500.000.000	700.000.000	200.000.000
Layanan Perkantoran	500.000.000	600.000.000	100.000.000
Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	-	453.700.000	453.700.000
Layanan Sarana Internal	-	453.700.000	453.700.000
Total	4.200.000.000	6.735.200.000	2.535.200.000

Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46. Realisasi Anggaran Per-Sub Direktorat

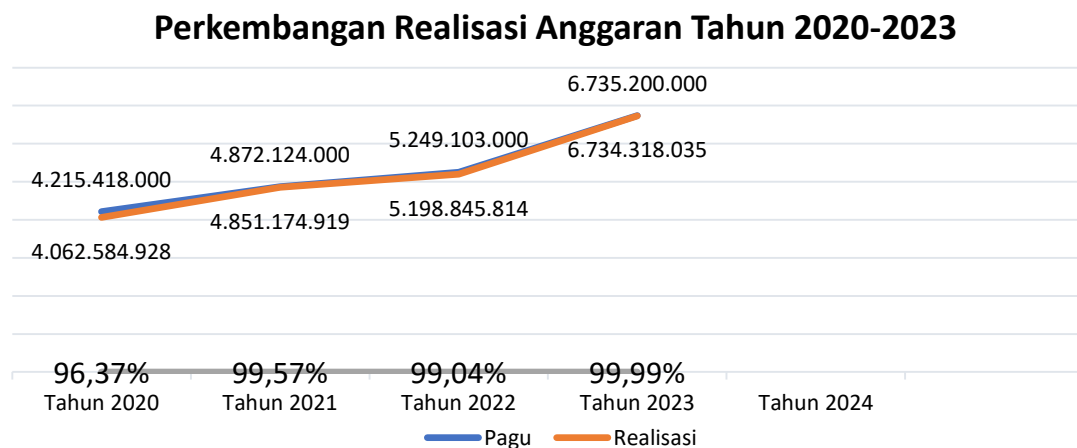
SUB DIREKTORAT/ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN 2023	REALISASI s.d DESEMBER 2023		FISIK %	DEVIASI
		Rp	%		
PSDH	2.631.500.000	2.631.374.653	100,00	100,00	0
JIGTLHK	2.350.000.000	2.349.981.150	100,00	100,00	0
TU	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96	100,00	0,04
JUMLAH	6.735.200.000	6.734.318.035	99,99	100,00	0,01

Tabel 47. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2022

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
003	DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN	6.735.200.000	6.734.318.035	99,99	100
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00	100
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00	100
5434.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	4.981.500.000	4.981.355.803	100,00	100
5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	950.000.000	949.932.146	99,99	100
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	400.000.000	399.940.470	99,99	100
052	Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	550.000.000	549.991.676	100,00	100
5434.BMA.004	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	2.350.000.000	2.349.981.150	100,00	100
051	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	2.350.000.000	2.349.981.150	100,00	100
5434.BMA.005	Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	375.000.000	375.000.000	100,00	100
051	Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	280.295.000	280.295.000	100,00	100
052	Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	94.705.000	94.705.000	100,00	100
5434.BMA.006	Data dan Informasi deforestasi	1.056.500.000	1.056.479.000	100,00	100
051	Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1.056.500.000	1.056.479.000	100,00	100

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
5434.BMA.007	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000.000	249.963.507	99,99	100
051	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000.000	249.963.507	99,99	100
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96	100
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1.753.700.000	1.752.962.232	99,96	100
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.300.000.000	1.299.262.232	99,94	100
5432.EBA.962	Layanan Umum	700.000.000	699.415.593	99,92	100
061	Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	700.000.000	699.415.593	99,92	100
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	600.000.000	599.846.639	99,97	100
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	600.000.000	599.846.639	99,97	100
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	453.700.000	453.700.000	100,00	100
Total		6.735.200.000	6.734.318.035	99,99	100

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada empat tahun terakhir terlihat pada grafik berikut:



Gambar 32. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Penyerapan anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya komitmen Direktorat IPSDH yang berupaya untuk melaksanakan kontrak kinerja dengan Dirjen PKTL dalam pencapaian 100% pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kinerja.

3.5. Penghargaan atas Prestasi Kerja

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terus berupaya memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Beberapa penghargaan diperoleh Direktorat IPSDH yang menunjukkan pengakuan dari pihak luar atas prestasi yang dicapai. Penghargaan tersebut adalah:

1. Penghargaan “Bhumandala Kanaka (Emas)” Tahun 2023 Kategori K/L yaitu sebagai Simpul Jaringan Geospasial Terbaik K/L. Penghargaan ini diberikan oleh BIG selaku pembina data geospasial atas prestasi KLHK dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. Dalam hal ini, KLHK melalui Direktorat IPSDH telah mengembangkan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Geospasial) guna pemanfaatan informasi geospasial secara luas baik untuk internal maupun eksternal KLHK. Simpul jaringan geospasial KLHK dianggap telah berhasil menerapkan lima pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar dan pilar teknologi.
2. Direktorat IPSDH mendapatkan penghargaan sebagai “Unit Pengolah Kategori AA (Sangat Memuaskan)” dengan nilai pengawasan sebesar 91,86 berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal KLHK Tahun 2023, sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal KLHK Nomor SK.9430/Menlhk-Setjen/ROUM/SET.2/9/2023.
3. Sertifikasi SNI ISO 9001:2015 atas Kualitas Sistem Manajemen pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2023 bernilai 0.01 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan capaian fisik tersebut.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan dan sasaran tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

4.2. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM
2. Penambahan SDM sesuai dengan beban kerja
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
5. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung peningkatan capaian sasaran strategis.
6. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien
7. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas hasilkegiatan



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat